**BAB II**

**LANDASAN TEORITIS**

1. Partisipasi Masyarakat
2. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Damsar dan Indrayani mendefinisikan partisipasi secara etimologi dengan akar katanya berasal dari bahasa inggris “*Part”*yang berarti bagian. Apabila akar kata ini dikembangkan dengan “*to Participate”* maka akan dapat diartikan dengan turut ambil bagian secara alami yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan ambil bagian secara terpaksa atau sukarela.[[1]](#footnote-2)

Berdasarkan definisi di atas maka cukup selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh Bornby dalam kamus bahasa sosiologinya yang mengemukakan bahwa partisipasi merupakan tindakan ambil bagian dalam sebuah kegiatan dan pernyataan dengan tujuan mengambil manfaat.[[2]](#footnote-3)

Menurut pendapat lain seperti theodorson dalam kamus sosiologi Ia menyebutkan bahwa partisipasi merupakan ambil bagian dalam kegiatan sosial masyarakat diluar profesi dan pekerjaannya. Keikutsertaan seseorang dalam aktifitas sosial diakibatkan oleh interaksi yang dilakukan terus-menerus. Sementara beal juga menambahkan bahwa partisipasi yang berasal dari luar atau pengaruh ekternal maka diindikasikan sebagai perubahan *eksogen* (*exogenous change*).[[3]](#footnote-4) Karakteristik dari partisipasi ini terlihat pada semakin mantapnya jaringan sosial (social networking).

Sementara menurut Verhaggen menambahkan bahwa partisipasi merupakan komunikasi dan interaksi dalam bentuk khusus dalam pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Jadi tidak semua komunikasi dan interaksi disebut partisipasi kecuali yang berkaitan dengan kerjasama atau menggerakkan suatu kegiatan bersama. Pendapat ini selaras dengan Cary “partisipasi” umumnya mengajak mayarakat untuk bekerjasama untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.[[4]](#footnote-5)

Pendapat lain menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu proses dimana masyarakat sebagai *stakeholder* artinya masyarakat sebagai penentu dalam sebuah pembangunan baik sebagai pengendali maupun mempengaruhi dalam sebuah kebijakan, hal ini diungkapkan oleh Tikson. Menurut Cohen lebih sistematik lagi mendefinisikan partisipasi pada empat hal yaitu ....*participation in decision making, participation in implementation, participation in benefits and participation in evaluation.[[5]](#footnote-6)*

Kalau dilihat dari tingkatan partisipasi yang muncul bukan karena proses alami tetapi melalui proses pembelajaran sosialisasi maka Mochtar Danil mengungkapkan beberapa bentuk partisipasi, antara lain; Partisipasi Spontan/inisiatif yaitu partisipasi yang dilakukan atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari siapa dan manapun, partisipasi ini biasanya akan muncul tiba-tiba tanpa ada unsur yang lain *Fasilitasi* yaitu partisipasi yang dimunculkan atas dorongan sesuatu untuk menyelesaikan masalah bersama. *Induksi* yaitu partisipasi berdasarkan bujukan atau rayuan.. *Koptasi* yaitu partisipasi yang bersifat pragmastis, masyarakat diajak berpartisipasi dengan iming-imimg keuntungan pribadi. *Dipaksa* yaitu partisipasi yang didorong oleh sanksi, biasanya aturan yang dibuat oleh penguasa.[[6]](#footnote-7)

Pengertian partisipasi dari sudut pandang orang minang adalah aktifitas sukarela atau ambil bagian tanpa mengharapkan imbalan. Ambil bagian tidak diukur dari besar kecilnya tetapi yang dinilai adalah keberadaan atau eksistensi. Maka ada istilah dalam Minangkabau *sato sakaki* (ikut sekaki) maksudnya adalah ambil bagian dalam aktifitas publik walaupun sekedarnya baik materil maupun non materil yang penting diakui eksistensinya.[[7]](#footnote-8)

Keberadaan seseorang dalam masyarakat atau komunitas sangat ditentukan oleh peran yang dimainkannya. Dia ada karena *sato sakaki.* Dalam konteks budaya Minangkabau, keberadaan seseorang dalam komunitas tidak selalu dikaitkan dengan keberadaan fisik orang tersebut dalam suatu komunitas. Orang yang berada diluar komunitas, karena memang berada di rantau (di luar kampung halaman sebagai perantau), bisa saja dirasakan selalu kehadirannya ditengah komunitas karena dia selalu *sato sakaki* dalam setiap aktivitas publik, seperti mengirimkan uang untuk pembangunan masjid, perbaikan jalan kampung, rehabilitas kantor wali nagari, atau untuk merayakan peringatan hari besar keagamaan dan nasional.

Partisipasi juga dimengerti sebagai berperan serta atau ikut serta, yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan publik, baik yang memiliki dimensi politik maupun non politik, dapat terselenggarakan dengan baik karena adanya peran serta atau keikutsertaan warga. Dalam berbagai kegiatan pemilihan umum (Legislatif, Presiden, Kepala daerah, dan Kepala desa) di Indonesia, misalnya, warga merancang tempat dan lokasi pemilihan sedemikian rupa supaya warga tertarik datang ke tempat pemungutan suara. Atau dalam berbagai kegiatan pembangunan fasilitas publik seperti irigasi, jalan desa, atau kebersihan lingkungan desa dilakukan secara bersama atau secara bergotong royong, di antara sesama warga desa. Kegiatan-kegiatan seperti ini di mengerti sebagai partisipasi.

**Tabel 2. Pengertian Partisipasi menurut Para Ahli**

|  |  |
| --- | --- |
| Borny (1974) dan Wbster (1976) | Suatu tindakan ambil bagian dalam bentuk kegiatan dan pernyataan dengan maksud memperoleh manfaat |
| Theodorson, (1969) | Keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian diluar profesi dan pekerjaannya |
| Raharjo (1983) | Keikutsertaan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain |
| Beal (1964) | partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya ransangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen |
| Verhagen (1979) | Partisipasi merupakan suatu kombinasi interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pemberian kewenangan, tanggungjawab, dan manfaat |
| Cary | “partisipasi” pada umumnya bermakna mengajak masyarakat untuk turut bekerja atau melaksanakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri . |
| Tikson | merupakan suatu proses dimana masyarakat sebagai *stakeholders,* terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan ditempat mereka masing-masing |
| Cohen | Partisipasi adalah perencanan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi (*participation in decision making, participation in implementation, participation in benefits and participation in evaluation*) |
| Mochtar Danil | partisipasi bukanlah proses alami, tetapi melalui proses pembelajaran sosialisasi |
| Damsar | *Sato Sakaki* artinya ikut ambil bagian dalam suatu aktivitas publik walau sekadarnya, katakanlah sekaki |

Dari beberapa definisi yang disebutkan oleh para ahli tentang Partisipasi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa para ahli sepakat menyatakan partisipasi adalah ambil bagian atau keikutsertaan seseorang dalam bentuk apapun baik kegiatan maupun pernyataan.

Masyarakat adalah sekelompok individu yang saling berinteraksi dan berkomunikasi secara berkelanjutan, sehingga membentuk hubungan sosial yang permanen dan terorganisir. Basis pembangunan tertuju pada masyarakat lokal yang perwujudannya berupa pemberian kewenangan dan peningkatan kemampuan untuk mengelola pembangunan mulai pada tahap menelaah masalah, perencanaan dan pelaksanaanya. Maka sangat penting dalam pembangunan sebuah kemampuan strategi dalam meningkatkan power internal sebagai motivasi dinamika pembangunan.[[8]](#footnote-9)

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang merupakan manisfestasi dari kepedulian dan kesadaran serta tanggungjawab terhadap kebutuhan sebuah pembangunan demi meningkatkan mutu hidup mereka. Makna yang terkandung dalam partisipasi pada setiap kegiatan pembangunan adalah keterlibatan masayarakat dalam memperbaiki dan diperbaiki kualitas hidupnya yang bukan saja menghandalkan keterlibatan aparat saja

Berdasarkan pemikiran Aprilia Theresia[[9]](#footnote-10) cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah *pertama*, dalam pengambilan keputusan pada sebuah program pembangunan, *kedua*, sebagai pemerataan dan evaluasi pembangunan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan prilaku dan *ketiga*, pemanfaatan hasil pembangunan, seperti halnya pembangunan MCK , puskesmas dan lain sebagainnya

Sebagimana yang juga diungkapkan oleh Dwingrum bahwa Partisipasi masyarakat, menekankan pada dua hal yaitu pengambilan keputusan secara langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan kemudian partisipasi masyarakat dalam proaktif dalam pelaksanaan program pembangunan dengan melakukan kesepakatan dan pembagian kewenangan serta tanggungjawab yang setara.[[10]](#footnote-11)

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang baik adalah pemberdayaan yang terorganisir, terencana dan pengembangan berbagai aktifitas program, baik secara ekonomi, sosial budaya maupun politik. Dalam rangka pelaksanaan dan keberhasilan suatu pemberdayaan maka dibutuhkan partisipasi masyarakat guna merevitalisasi konsep pembangunan, untuk menghasilakan sebuah perubahan positif kehidupan dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan membina kemandirian masyarakat.[[11]](#footnote-12)

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam sebuah pemberdayaan merupakan salah satu indikator keberhasilan, namun tidak semua partisipasi dalam pemberdayaan dapat dikatakan berhasil. Pemberdayaan sangat terkait dengan demokrasi atau kebebasan individu dalam berperan. Maka partisipasi yang dipaksakan dalam pemberdayaan, yang masyarakat tidak mengetahui kebutuhan dan potensi tidaklah termasuk pemberdayaan. Sejatinya pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat atas kesadaran tentang kebutuhan dan potensinya.

Makna partisipasi yang sesungguhnya bukan hanya sekedar keterlibatan masyarakat pada pembangunan, atau bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu. Tetapi partisipasi masyarakat merupakan suatu proses adanya kesadaran untuk berubah dan pembelajaran menuju kearah perbaikan dan peningkatan kesejahteraan hidup.

Kalau ditelusuri makna partisipasi dalam penyuluhan pembangunan atau pemberdayaan menurut ahli seperti Asngari dalam Oos M Anwas menyebutkan ada 6 hal semestinya individu atau masyarakat terlibat dalam suatu kegiatan agar disebut berpartisipasi diantaranya[[12]](#footnote-13): *pertama* keterlibatan dalam pengambilan keputusan,*kedua* keterlibatan dalam pengawasan,*ketiga* keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan, *keempat* partisipasi sebagai proses pemberdayaan (*Empowerment*), *kelima* partisipasi bermakna kerja kemitraan (*Partnership*), dan *keenam* partisipasi sebagai akibat dari pengaruh *stakeholder* menyangkut pengambilan keputusan, pengawasan dan penggunaan *resource* yang bermanfaat bagi mereka. Maka dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya sebagai formalitas dalam pembangunan tetapi terlibat penuh dalam suatu pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil sampai dengan pengawasana, serta bermitra dengan berbagai pihak terkait.

Begitu juga partisipasi dalam kontek penyuluhan pertanian menurut Van den ban dan Hawkins[[13]](#footnote-14), Ia menyebutkan bahwa para petani dalam pembangunan mesti berpartisipasi penuh sebagaimana yang disampaikan oleh Asngari, sehingga masyarakat merasakan manfaat secara langsung dan dapat membina kemandirian serta merasakan betul perjuangannya dalam sebuah pembangunan

Ketika partisipasi individu dan masyarakat secara penuh dalam pembangunan telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan membina kemandirian, dengan arti kata bahwa partisipasi menjadi motor pengerak penentu dalam pemberdayaan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana pemberdayaan mampu melakukan suatu gebrakan dalam memberikan kesadaran kepada individu dan masyarakat untuk dapat berpartisipasi penuh agar memiliki kemampuan dan keterampilan dalam setiap pembangunan, .

Untuk menjawab permasalahan besar yang terkait dengan membangkitkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi pada sebuah pembangunan menurut Slamet[[14]](#footnote-15) adalah memerikan kesempatan kepada individu atau masyarakat untuk berpartisipasi dengan meningkatkan kemampuan, dan keterampilan serta kemauan. Seorang agen pemberdayaan harus mampu menciptakan aktifitas sebanyak-banyaknya dan bermanfaat bagi khalayak ramai. Kemudian mengelola sumber daya alam, membantu sarana prasarana, membuka akses pasar dan bekerjasaman dengan berbagai pihak untuk membuka kesempatan kerja, mendapatkan informasi, memberikan kemudahan kredit dan mempermudah perijinan. Ketika kesempatan kerja terbuka seluas-luasnya maka akan mampu meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan serta akan tercipta kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyediakan kemudahan kesempatan kerja tentu ada faktor pendukung yang patut diperhatikan agar dapat diwujudkan diantaranya adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan individu atau masyarakat.Usaha dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan memberikan pelatihan, pendampingan, studi banding dan lainnya yang disesuaikan dengan potensi masyarakat dan kondisi situasi lingkungan.

Aspek kemampuan individu dan masyarakat juga dapat ditumbuhkan melalui proses penyadaran kritis. Ketiga prasyarat itu saling terkait sehingga lemah di salah satu aspek menjadikan lemah pula tingkat partisipasinya. Di samping itu pastisipasi juga perlu dilandasai oleh tujuan memperoleh manfaat bagi dirinya dan bukan sekedar dilandasi oleh kesedian berkorban.

Berkenaan dengan hal tersebut ansgari[[15]](#footnote-16) menekankan bahwa pada prinsipnya sesorang mau berpartisipasi pada suatu kegiatan jika (1) sesorang mengetahui bahwa ia akan merasakan manfaat secara langsung baik secara materil maupun non materil, dan (2) seseorang merasa dilibatkan secara penuh dengan mengetahui seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta maksud dan tujuan. Setiap aktivitas pemberdayaan perlu didasarkan akan adanya manfaat terhadap diri, keluarga atau masyarakat lainnya akan perlunya mereka berpartisipasi dalam pembangunan. Disisi lain kejelasan setiap tahapan kegiatan sebagai proses aktivitas, sehingga individu dan masyarakat akan mau dan mampu melakukan secara benar dan menyenangkan sehingga mereka terdorong untuk aktif berpartisipasi.

Pada zaman modern sekarang ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin sulit. Budaya bergotong royong dan bekerjasama sudah mulai berkurang dan malah sudah terkikis dengan adanya pengaruh budaya luar. Untuk mengembalikan budaya tersebut dalam masyarakat diperlukan adanya saluran komunikasi antar masyarakat. Menurut prof Margono Slamet[[16]](#footnote-17) (Guru Besar IPB Bogor ) bahwa salah satu cara meningkatkan partisipasi dalam masyarakat adalah perlunya ditumbuhkan berbagai lembaga-lembaga non formal yang ada di masyarakat. Lembaga non formal yang ada dimasyarakat antara lain: majelis taklim, karang taruna, posyandu pos pemberdayaan Masyarakat (Posdaya), PAUD, organisasi sosial kemasyarakatan dan bentuk lainnya.

Selain membangun saluran komunikasi antar masyarakat dengan mendirikan beberapa lembaga non formal maka yang tidak kalah pentingnya pada saat ini adalah peran media massa sebagai salah satu sumber informasi dalam masyarakat memiliki peran dalam menciptakan partisipasi pembangunan. Informasi dari media massa yang benar dan berimbang menjadi modal penting dalam mendorong masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam hal ini media massa dapat membantu menciptakan kondisi itu melalui siaran dan isi pesan yang disampaikan.

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan seperti diuraikan di atas semua itu kata kuncinya adalah masyarakat perlu diberikan kepercayaan untuk mengurus dan mengatur diri dari lingkunganya. Tugas pemerintah dan agen pemberdayaan sebagai fasilitator, motivator, atau memberikan pendampinangan yang diperlukan masyarakat. Hal ini sesuai dengan falsafah Ki Hajar Dewantoro,[[17]](#footnote-18) bahwa seorang guru atau agen pemberdayaan harus bisa tampil di depan (*Ing ngarso sang tulodo*), tengah (*ing madya mangun karso*) dan dibelakang (*tut wuri handayani*). Agen pemberdayaan dituntut memahami kapan ia tampil di depan, di tengah, atau di belakang dalam menciptakan masyarakat untuk aktif dalam pembangunan di segala bidang.

Salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat yang mesti diketahui oleh agen pemberdayaan. Oleh karena itu indikator dalam evaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara benar. Mengukur partisipasi masyarakat menurut Ife dan Tesoriere[[18]](#footnote-19) dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif dalam mengukur partiisipasi mencakup ;

* 1. Terciptanya Perubahan-perubahan positif dalam layanan lokal
	2. Intensitas Jumlah pertemuan dan jumlah peserta
	3. Proporsi berbagai bagian dari kehadiran masyarakat
	4. Semakin banyaknya orang yang dipengaruhi oleh isu
	5. Melahirkan banyak pemimpin yang memegang peranan
	6. Meningkatnya jumlah masyarakat lokal yang memegang peran dalam proyek dan
	7. Jumlah warga lokal dalam berbagai aspek proyek dan pada waktu yang berbeda-beda.

Maka indikator indikator partisipasi masyarakat secara kuantitatif sangat ditentukan oleh Semakin tingginya skor yang diperoleh atau sebaliknya. Secara kualitatif indikator dalam partisipasi masyarakat menurut Ife dan Tesoriere[[19]](#footnote-20) mencakup:

* + 1. Masyarakat memiliki kapasitas dalam menggerakkan aksi
		2. Semakin kuatnya dukungan masyarakat dan bertambah luasnya jaringan.
		3. Memiliki pengetahuan yang mapan tentang manajemen proyek dan keuangan.
		4. Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan.
		5. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengubah keputusan menjadi aksi
		6. Meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi proyek untuk mewakilinya dalam organisasi-organisasi lain
	1. Pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat
	2. Meningkatnya jaringan dengan proyek-proyek, masyarakat dan organisasi lainnya dan
	3. Mulai mempengaruhi kebijakan

Indikator-indikator partisipasi tersebut baik secara kuantitatif maupun kualitatif dapat menjadi acuan dalam mengukur partisipasi masyarakat yang efektif dalam kegiatan pemberdayaan. Agen pemberdayaan dapat menentukan sejumlah indikator atau seluruh indikator tersebut berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada. Agen pemberdayaan juga dapat menentukan jumlah indikator minimum atau indikator prioritas, indikator yang mempresentasikan proses partisipasi serta sesuai dengan tujuan dari kegiatan pemberdayaan tersebut.

Dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dalam bentuk pemberdayaan, yang melibatkan diri secara sadar tanpa paksaan, kemudian masyarakat terlibat secara penuh dari mulai perencanaan, keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kesempatan, kemampuan dan keterampilan serta kemandirian, guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat dalam pembangunan.

1. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Dusseldorp dalam Aprillia Theresia identifikasi dari bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dilihat dari besar kecilnya dapat berupa:

1. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
2. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
3. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
4. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat
5. Menggerakkan sumber daya masyarakat
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.[[20]](#footnote-21)

Sedangkan menurut Huraerah ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat baik dalam bentuk fisik maupun non fisik yaitu:

1. Partisipasi buah pikiran, dalam setiap pertemuan atau rapat
2. Partisipasi tenaga, diberikan dalam bentuk kerja bakti atau gotongroyong di setiap pembangunan
3. Partisipasi harta benda berupa uang dan makanan yang diberikan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.[[21]](#footnote-22)

Menurut Cohen dan Uphoff menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terdiri dari :

* 1. *Participation in decision making*
	2. *Participation in implementation*
	3. *Participation in benefits*
	4. *Participation in evaluation[[22]](#footnote-23)*

Dari bebarapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi partisipasi masyarakat yang bisa disumbangkan untuk suatu pengembangan kualitas hidup masyarakat terutama pada pengembangan pariwisata adalah :

**Tabel 3. Dimensi-dimensi Partisipasi dan Indikatornya**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Dimensi Partisipasi** | **Indikator Partisipasi** |
| 1 | Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan | 1) keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, 2) kesediaan dalam memberikan data dan informasi, 3) keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana program pariwisata, 4) keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan dan 5) keterlibatan dalam pengambilan keputusan. |
| 2 | Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan. | 1) keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan program pariwisata, 2) kesediaan memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian dan keterampilan, 3) kesediaan memberikan sumbangan berupa uang, materi dan bahan-bahan, dan 4) tanggung jawab terhadap keberhasilan program pariwisata. |
| 3 | Keterlibatan dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil. | 1) pemahaman tentang hakikat kepariwisataan, 2) kesediaan dalam menerima dan memanfaatkan hasil kepariwisataan, 3) kesediaan dalam melestarikan hasil-hasil kepariwisataan, 4) kesediaan dalam mengembangkan hasil kepariwisataan. |
| 4 | Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil. | 1) adanya norma atau aturan standar, 2) adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, 3) keaktifan dalam melakukan pengawasan, 4) dampak pendapatan negara dan daerah, 5) dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, 6) dampak terhadap pengembangan sektor lain, 7) pemberian saran dan kritik dari masyarakat. |

1. Tahapan Partisipasi

Ada beberapa pendapat para ahli tentang tahapan dalam meningkatkan partisipasi diantaranya, menurut Suyono[[23]](#footnote-24) ada 4 tahapan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dimana setiap tahapan mendukung untuk tahapan berikutnya, tahapan tersebut yaitu *pertama* tahapan awal atau tahap perluasan jangkauan, tahap *kedua* pembinaan (*Maintenance*), tahap *ketiga* pelembagaan atau pemberdayaan dan tahapan akhir (*reward*).

Tahapan *awal* disebut juga sebagai perluasan jangkauan, dalam tahap ini upaya peningkatan partisipasi masyarakat harus dilakukan secara sederhana, bisa dipahami banyak orang. Semua orang bisa mengerti, mengikuti sehingga pada akhir bisa memahami walaupun kadarnya berbeda-beda. Cara penyampaian juga sederhana. Komunikasi lebih bersifat massal atau komunikasi massa. Tahapan ini merupakan bagian advokasi. Disini perlu juga melakukan komunikasi atau pendekatan kepada pemimpin formal atau informal, karena pemimpin ini akan menjadi contoh bagi pengikutnya.

Tahapan *kedua* pembinaan (*Maintenance*) yaitu setelah dilakukan komunikasi atau perluasan secara massal tentunya masyarakat merespon secara beragam beragantung karakter dan kebutuhannya. Oleh karena itu tahapan selanjutnya perlu adanya pembagian sasaran yang jelas. Pembagian sasaran (*Segmented*) berdasarkan karakteristik, kebutuhan dan potensinya. Komunikasi disini menyesuaikan dengan sasaran. Pada tahap ini sangat nampak adanya *people centered* , sehingga bisa saja programnya di kelompok satu sangat komplek, sebaliknya di kelompok lain begitu sederhana.

Tahapan *ketiga* pelembagaan atau pembudayaan. Pada tahap ini informasi tidak lagi datang dari pemerintah, tetapi dari anggota atau kelompok masing-masing. Disini anggota kelompok masyarakat beragam dari mulai yang tinggi, sedang atau rendah mencari padanan informasi. Ditahapan ini masyarakat menjadi *homofilia*. Bentuknya misalnya kelompok tani sudah terbentuk dan kegiatannya sudah berjalan. Penyuluh datang sekali-kali untuk memberikan arahan atau tukar pengalaman terhadap pemecahan masalah yang dihadapi petani.

Tahapan terakhir adalah umpan balik atau reward. Reward ini ditujukan untuk meransang atau memberikan apreasiasi secara benar. Dalam perubahan sosial; jangan sampai ada hukuman. Hukuman justru akan mengeliminir partisipasi. Jika ada anggota masyarakat yang belum berhasil, sebaiknya didekati oleh anggota kelompok yang sudah berhasil. Hal ini mungkin saja tidak berhasilnya tersebut karena penyuluh kurang tepat dalam menerapkan metode atau ada unsur pribadi.

Kemudian Tahapan partispasi Menurut Taliziduhu Ndraha terbagi menjadi 6 bagian, yakni:

1. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial
2. Partisipasi dalam menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik menerima dengan lapang atau dengan syarat atau bahkan menolaknya
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan pengembangan hasil pembangunan
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.[[24]](#footnote-25)

Selanjutnya menurut Yoyon Suryono dan Yudan Hermawan dalam jurnal pendidikan dan pemberdayaan masyarakat,[[25]](#footnote-26) menyebutkan bahwa tahapan partisipasi masyarakat ada empat yakni partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi.

Sebagaimana Tahapan partisipasi Menurut Priasukimana dan Mulyadin[[26]](#footnote-27) menjabarkan pada pengembangan desa wisata seperti pada dibawah ini:

**Tabel 4. Tahapan Partisipasi dalam Pengembangan Desa Wisata**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tahap partisipasi** | **Indikator** |
| 1 | Perencanaan | Survey Lapangan Penyusunan Rencana TapakPenyusunan Anggaran dan Sumber Anggaran Perencanaan SDM |
| 2 | Pelaksanaan Pembangunan | Pengembangan PrasaranaPelaksanaan Pembangunan |
| 3 | Pengelolaan | Perekrutan SDMPengorganisasianPromosi |
| 4 | Evaluasi | Penelitian dan PengembanganPelaporan |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa partisipasi pada perencanaan diawali dengan survey dilapangan untuk mengidentifikasi masalah atau potensi pariwisata dengan berkonsultasi dengan berbagai pihak dan menyesuaikan dengan jumlah besarnya anggaran Tahapan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan berupa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perbaikan struktur, pemberian sumbangan dana, tenaga dan lainnya untuk kegiatan pariwisata dan dilanjutkan dengan pelatihan pariwisata. Partisipasi dalam pengelolaan perekrutan sumber daya manusia (tenaga pemungut retribusi, tukang parkir, dan lain-lain) berpartisipasi dalam mewujudkan sapta pesona pariwisata, mendukung dan mempromosikan pariwisata. Tahapan partisipasi dalam evaluasi berupa ikut mengawasi kegiatan pariwisata, terlibat dalam penelitian dan pengembangan serta menyusun laporan evaluasi untuk pengembangan pariwisata.

Setiap tahap proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat akan berjalan sesuai dengan yang mereka inginkan apabila mereka sendiri yang terlibat dalam proses penyelesaiannya, dimulai dari perencanaan sampai pada tahap akhir yaitu evaluasi. Dari beberapa teori diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tahapan partisipasi ada perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi.

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari mekanisme, bentuk dan tahapan partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya, namun partisipasi bukanlah suatu jaminan untuk mencapai suatu keberhasilan tetapi sebuah intrumental dalam mencapai keberhasilan.

Dari beberapa paparan tentang tahapan partisipasi maka dalam penelitian akan menggunakan tahapan partisipasi pada pengembangan pariwisata menurut Yudan Hermawan dan Yoyon Suryono serta Priasukimana dan Mulyadin yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil.

1. Manfaat partisipasi

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat mesti melibatkan partisipasi masyarakat dan merasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat setempat. Sebagaimana Menurut Suansri dalam Sunaryo pariwisata berbasis masyarakat dapat memerikan manfaat yang meliputi 5 dimensi pengembangan yang merupakan aspek utama pembangunan kepariwisataan sebagai berikut:

* 1. Dimensi Ekonomi: dengan indikator berupa terciptanya lapangan kerja disektor pariwisata, berkembangnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor tersebut dan adanya dana untuk pengembangan komunitas.
	2. Dimensi Sosial : mengangkat harkat dan martabat hidup, memiliki kebebasan berpendapat, pembagian peran gender yang adil dan bergabung serta memperkuat komunitas
	3. Dimensi Budaya: menjaga dan melestarikan budaya setempat, menghormati budaya lain dan menumbuhkan budaya membangun..
	4. Dimensi Lingkungan : menjaga dan melestarikan lingkungan dengan pengelolaan sampah yang baik dan perlunya konservasi dan preservasi lingkungan.
	5. Dimensi Politik: kepercayaan penuh kepada penduduk lokal dalam pengelolaan dan adanya jaminan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.[[27]](#footnote-28)

Partisipasi masyarakat sebagai ujung tombak dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat karena dapat memberikan keuntungan langsung kepada masyarkat pada lima dimensi tersebut di atas sebagaimana yang disampaikan oleh Suansri.

1. Faktor yang Mempengaruhi partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan tumbuh dan berkembang jika adanya kepercayaan dan kesempatan dari pemerintah. Karena objek dari adanya pembangunan itu adalah masyarakat. Dalam pihak partisispasi masayarakat juga ditentukan oleh adanya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan merupakan faktor penentu dalam berkembangnya partisipasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Theresia[[28]](#footnote-29) partisipasi masyarakat dalam bentuk ikut andil pada dunia politik mulai dari perencanaan sampai pemanfaatan hasil merupakan salah satu peluang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Termasuk juga dalam pemanfaatan sumber daya alam, penggunaan teknologi, kesempatan dalam berorganisasi dan mengembangkan kepemimpinan.

Kesempatan yang diberikan, kemudian kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan untuk membangun serta kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi merupakan faktor pendorong tumbuhnya partisipasi. Kemauan masyarakat untuk berpartisipasi juga ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya.

Menurut. Jim Ife & Frank Teoriero dalam teori partisipasi mengemukakan bahwa dalam program pengembangan/pemberdayaan masyarakat mesti mendorong pengakuan dan peningkatan hak dan kewajiban dalam berpartisipasi. Faktor pendorong dalam partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Aktifitas atau isu tersebut dianggap penting
2. Aksi yang dilakukan oleh mereka akan membuat sebuah perubahan.
3. Setiap keterlibatan atau partisipasi mesti diakui dan dihargai.
4. Adanya dorongan dan motivasi dari luar.
5. Memberikan kepercayaan dan tidak meremehkam masyarakat yang tidak mampu berfikir cepat.[[29]](#footnote-30)

Dalam sebuah penelitian di jamaika menyebutkan bahwa masyarakat akan berpartisipasi disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Adanya organisasi yang sudah dikenal dan terpecaya ditengah-tengah masyarakat
2. Memberikan manfaat secara langsung untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat.
3. Adanya kontrol dari masyarakat terhadap pengaruh partisipasi yang dilakukan, apakah berperan atau tidak dalam pengambilan keputusan[[30]](#footnote-31)

Sementara dalam partisipasi juga ada faktor penghambat sebagaimana yang disebutkan oleh Watson[[31]](#footnote-32) menyebutkan bahwa ada beberapa kendala yang menghambat partisipasi, faktor pertama adalah kendala yang bersumber dari individu yang memiliki ketergantungan dengan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh dominasi pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga masyarakat tidak memiliki inisiatif. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor internal dan ekternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi individu yaitu, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Sementara faktor eksternal adalah yang berkaitan dengan pengambil kebijakan yang akan mempengaruhi keberhasilan program.[[32]](#footnote-33)

Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan sangat penting, maka segala hambatan yang akan merusak partisipasi harus diminimalis. Pemerintah yang merupakan pengambil kebijakan semestinya mengetahui secara mendalam kondisi dan situasi masyarakat yang akan diberdayakan. Masyarakat mesti terlibat penuh dengan memberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan. Sehingga mereka merasa memiliki dan menumbuhkan rasa tanggungjawab. Kunci kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan.

1. Pengertian Implikasi menurut Para Ahli

Menurut M Irfan Islamy dalam bukunya Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara “Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan” Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.[[33]](#footnote-34). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implikasi didefinisikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil suatu penelitian, akan tetapi secara bahasa memiliki arti sesuatu yang telah tersimpul di dalamnya[[34]](#footnote-35).

Menurut Winarno :Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik danimplikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik[[35]](#footnote-36).

Menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.[[36]](#footnote-37)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan dari keterlibatan /partisipasi masyarakat dalam implementasi program pariwisata di propinsi sumatera barat

1. Pengembangan Pariwisata
2. Pengertian pariwisata

Secara bahasa, pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata “pari” berarti penuh, seluruh, atau semua dan kata “wisata” yang bermakna perjalanan.[[37]](#footnote-38) Pengertian pariwisata di indonesia baru dikenalkan pada tahun 1960 dari istilah Dewan Tourisme Indonesia (DTI) diubah menjadi Dewan pariwisata indonesia (DEPARI). Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan untuk bersenang-senang (*Travel for Pleasure*).[[38]](#footnote-39)

Kata pariwisata mestinya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan terus-menerus atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain yang kita kenal dengan istilah *tour dalam* bahasainggris*.* Sedangkanuntuk pengertian jamak atau untuk menyebut kepariwisataan dapat digunakan istilah *tourisme* (belanda) atau *tourism*.[[39]](#footnote-40)

Menurut Yoeti dalam bukunya Pemasaran Wisata, menyatakan bahwa suatu perjalanan disebuat sebuah perjalanan pariwisata apabila: (1) perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain diluar kediaman tempat tinggal; (2) maksud perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang dan tidak bermaksud mencari nafkah di tempat atau negara yang dikunjunginya; (3) hanya sebagai konsumen di tempat yang dikunjungi.[[40]](#footnote-41)

Kemudian dalam Al Quran istilah wisata (*Tasyiran*) dari kata kerja (fi’il) yang berpola isim (tafdhil) yaitu *tsulasi mazid* satu huruf yang berarti dengan masa’. (perjalanan). Kata tasyiran dalam bahasa arab ditemui berakar dari huruf, (*sin ya dan ra*) yang berarti (berlalu dan berjalan). Kata *sairan/tasyiran* dengan derivasinya terulang dalam al Quran ada sebanyak 20 kali, tergelar dalam 18 surat, yaitu 5 kali pada surat Makkiyah dan 13 kali pada surat madaniyah hal ini dapat dilihat sebagai berikut:[[41]](#footnote-42)

1. Surat Ali Imran : 137 (3/112). Ayat ini memberi isyarat kepada umat manusia untuk berjalan dimuka bumi dalam upaya memperhatikan bekas peninggalan masa lalu dari suatu umat masa silam. Dalam hal ini Allah memberikan hukuman berupa malapetaka, bencana yang ditimpakan kepada mereka yang tidak mau mengakui Rasulullah. Justru perhatikan bagaimana akibatnya terhadap mereka.
2. Al An’am 11 (6/55). Ayat ini merupakan perintah kepada umat manusia agar berjalanlah dimuka bumi untuk dapat memperhatikan bagaimana akibat umat masa lalu itu yang mereka olok-olok dengan Rasul dan bahkan mendustakannya.
3. Yunus 22 (10/51). Ayat ini sebagai isyarat mutlak kepada manusia bahwa Allahlah yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk dapat berjalan di darat, dan berlayar di laut dengan fasilitas angin yang disediakan adalah sebagai ke Maha Kuasaan Allah kepada manusia
4. Yunus 109 (12/53). Ayat ini ditujukan kepada umat Nabi Nuh as dimana mereka dianjurkan untuk dapat memperhatikan di muka bumi ini dan bagaimana keseudahan mereka yang tidak mau mengimani Rasul.
5. An Nahl 36 (16/70). Ayat ini memberikan penegasan bahwa tiap-tiap umat mempunyai Rasul untuk menerangkan kebenaran kepada umatnya, diantara umat kepada Rasulnya, ada yang mengikutinya dan ada pula yang mengingkarinya, khusus bagi umat yang mengingkarinya, Allah memberi isyarat agar berjalan dimuka bumi dan bagaimana akibat mereka yang mendustakan Rasul.
6. Al Hajj: 46 (22/103). Ayat ini menjelaskan bahwa telah banyak kota-kota yang telah dibinasakan, karena penduduknya berbuat zalim, lalu Allah menampakkan kepada mereka, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi tidak memperhatikan bagaimana akibat prbuatannya, padahal mereka punya hati untuk dapat memahami, punya telinga untuk dapat mendengar
7. An Naml: 69 (27/47). Ayat ini mengemukakan tipologi orang kafir yang mereka tidak percaya terhadap hari akhirat. Untuk itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk berjalan dimuka bumi untuk memperhatikan bagaimana akibat manusia yang telah melakukan dosa.
8. Al Qashshash, 29 (28/49). Ayat ini mengisahkan Nabi Musa bersama keluarganya untuk pulang ke Mesir dan menerima wahyu untuk menyeru fir’aun kepada ajaran tauhid, maka Allah menyuruh Musa untuk berangkat meninggalkan desa Madyan.
9. Al Ankabut, 20 (29/85). Ayat ini memberi ketegasan kepada manusia untuk berjalan di muka bumi, lalu perhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia pada permulaanya, lalu Allah menghidupkan kembali pada hari lain, yaitu di akhirat.
10. Ar Rum, 9. 42 (30/84). Pada ayat ini Allah mempertayakan apakah kalian tidak berjalan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diterima oleh umat sebelumny, mereka kuat-kuat untuk mengolah tanah pertanian, namun mereka menzolimi dirinya sendiri dengan mengingkari Rasul sedangkan pada ayat 42 mengemukakan akibat orang yang mempersekutukan Allah.
11. Saba’ 18 (34/58). Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia punya negeri-negeri yang diberkahi dengan kesuburannya dan masing-masibng negeri tersebut terdapat jarak (perjalanan), maka berjalanlah di kota-kota tersebut baik pada malam maupun pada siang hari dengan aman.
12. Fathir, 44 (35/43). Ayai ini merupaka anjuran kepada manusia agar mengadakan perjalanan di muka bumi untuk membuktikan kekuasaan Allah
13. Ghafir (al Mu’min) 21, 82 (40/60). Ayat ini menunjukan hebat dan kuatnya umat Nabi Musa as, lalu Allah mengazab mereka disebabkan dosa yang mereka buat. Untuk itu berjalan di muka bumi bagaimana akibat perbuatan mereka.
14. Muhammad: 10 (47/95). Ayat ini menjelaskan kepada manusia agar selalu berjalan di muka bumi, supaya dapat dijadikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelumnya akibat kekafirannya.
15. Ar Ra’d 31 (13/96). Ayat ini menjelaskan tentang Nabi Luth agar berangkatlah pada akhir malam dengan keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang dan jangan menoleh kebelakang dan teruskanlah perjalanan sampai kepada tempat yang telah diperintah.
16. Al isra’ 1 (17/50). Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad Saw. Dari masjidil Haram ke Masjidil Aqsha sebagai bukti ke Maha kuasaan Allah Swt, agar dijadikan sebagai tanda-tanda keagungannya.
17. Thaha, 77 ( 20/45). Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa As dengan kaum Bani Israil yang mengejarnya, maka Allah memerintahkan kepada nabi Musa untuk pergi bersama pengikutnya pada malam hari dengan menempuh jalan ditengah laut yang kering sehingga tidak perlu khawatir kemungkinan tenggelam ditengah laut tersebut
18. Al syu’ara’, 52 (26/47). Ayat ini menjelaskan peristiwa Nabi Musa As dikejar oleh musuhny raja Fir’aun, maka Allah perintah untuk berangkat pada malam hari dengan pasukannya.

berdasarkan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah swt memberikan anjuran kepada manusia agar melakukan perjalanan (wisata) di bumi, dengan tujuan dapat menyaksikan bekas peninggalan dari masa ke masa yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah memberikan azab berupa musibah dan bencana yang ditimpakan kepada mereka. Hal tersebut diperlihatkan langsung oleh Allah kepada manusia agar dapat memfungsikan akal sehat secara maksimal selain itu berwisata bukan hanya di darat, akan tetapi dilaut dan di udara, dengan tujuan untuk memberikan petunjuk kepada jiwa manusia, begitu agungnya kekuasaan Allah Swt. Tentunya hal ini akan dapat membawa manusia sadar, dan meninggalkan prilaku thama’ dan sombong, bahkan lebih jauh dari itu melakukan perjalanan/wisata menambah wawasan, baik berupa perjalanan kerohanian, maupun wawasan intelektual terhadap yang melakukan wisata.

Berdasarkan pengertian pariwisata di atas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan seseorang sesuai dengan tujuan orang yang melakukannya, baik untuk bersenang-senang, menikmati alam semesta, edukasi, maupun peningkatan spritual dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah.

1. Pengelolaan /Manajemen Pariwisata

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *“management*”. Menurut Sudjana dalam pitana pengelolaan atau manajemen berarti kemampuan dan ketrampilan khusus yang dimiliki sesorang untuk melakukan suatu kegiatan baik bekerjasama dengan orang lain atau menggunakan orang lain dalam mencapai tujuan dan maksud organisasi. Menurut Leiper dalam Pitana, pengelolaan (manajemen) merujuk kepada seluruh peranan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang, atau berdasarkan kepada fungsi- fungsi yang melekat pada peran tersebut.[[42]](#footnote-43)

Para pakar manajemen sepakat mengemukakan *perspektif* yang hampir sama mengenai urutan fungsi manajemen, misalnya Fungsi-fungsi manajemen menurut Leiper yaitu *Planning* (perencanaan), *Directing* (mengarahkan), *Organizing* (termasuk *coordinating*), *Controlling* (pengawasan). Henri Fayol mengurutkan lima fungsi manajemen yang dikenal dengan singkatan POCCC, yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Commanding* (perintah), *Coordinating* (pengkoordiansian), *Controlling* (Pengawasan). Luther M Gullick mengurutkan enam fungsi manajemen dengan singkatan POSDCORB *(Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting,* dan *Budgeting*). manajemen sangatlah penting bagi perkembangan dan kemajuan suatu obyek wisata dalam menarik pengunjung. Secara umum penjelasan mengenai fungsi dan bagian-bagian dari pengelolaan dalam bidang wisata yaitu sebagai berikut

* 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan pariwisata berarti “Pengorganisasian” atau pelembagaan secara menyeluruh pengembangan/pembangunan fasilitas-fasilitas pariwisata, sehingga fasilitas-fasilitas tersebut secara efektif dapat memenuhi tugas sebagaimana mestinya. maka perencanaan pariwisata merupakan hal yang penting dari pengembangan/ pembangunan seluruhnya dan dapat memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam, sumber daya manusia, serta sumber keuangan dengan sebaik-baiknya

Oka A. Yoeti dalam Muljadi A.J mengemukakan bahwa aspek-aspek yang penting dicermati dalam perencanaan pariwisata, yaitu:[[43]](#footnote-44)

* + 1. Wisatawan *( tourist)*

Melakukan penelitian terlebih dahulu, karakteristik wisatawan yang menjadi sasaran, berasal dari negara mana saja mereka datang, kapan musim kunjungan,bentuk perjalanan, kondisi sosial ekonomi, tujuan dan berapa lama pengunjung menginap.

* + 1. Kendaraan *(transportation)*

penelitian tentang bagaimana sarana prasarana transportasi yang tersedia atau angkutan yang dapat digunakan untuk membawa wisatawan ke daerah tujuan wisata yang dituju. Kemudian apa alat transportasi lokial yang menjadi daya tari wisatawan..

* + 1. Daya tarik wisata

Ada tiga syarat daya tarik wisata yang layak dijual agar memberikan kepuasan kepada wisatawan antara lain: apa yang dilihat *(something to see),* apa yang dapat dilakukan *(something to do)* dan apa yang dapat dibeli *(something to buy)*

* + 1. Fasilitas pelayanan *(sevice facilities)*

Fasilitas sangat mendukung bagi pariwisata maka perlu melihat apa saja yang tersedia di daerah tujuan wisata tersebut, seperti bagaimana akomodasi yang ada, restoran, pelayanan

* + 1. Informasi dan promosi

Informasi dan promosi menjadi senjata ampuh untuk mengenali destinasi wisata maka calon wisatawan perlu memeperoleh tentang daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi, untuk itu perlu dipikirkan cara-cara publikasi atau promosi yang akan dilakukan.

* 1. Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan, dibutuhkan kesiapan dari semua *stakeholder* yang terlibat didalamnya, misalkan masyarakat itu sendiri, tenaga pendamping lapangan dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga diperlukan koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan *stakeholder* sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan. Dalam pelaksanaan masyarakat juga perlu memahami rencana yang akan dilaksanakan dengan kesamaan persepsi antara masyarakat lokal dengan lembaga atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

* 1. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses dalam standarisasi ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan mesti dilakukan secara terus menerus agar jika terjadi kelemahan atau hambatan pada setiap sektor dapat dikurangi.

* 1. Penilaian atau evaluasi

Penilaian adalah proses pengukuran dan pembandingan kinerja yang *kongkrit* dicapai dengan kinerja yang seharusnya dicapai. Penilaian dilakukan sejak dimulainya proses pelaksanaan perencanaan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas kegiatan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan sehingga akan diketahui kelemahan dan kelebihan dari perencanaan yang ada, guna perbaikan untuk pelaksanaan tahap berikutnya.

Pengelolaan pariwisata semestinya merujuk pada prinsip-prinsip pengelolaan yang memprioritaskan pada nilai-nilai kelestrarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan merasakan kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Menurut Cox dalam Pitana dan Diarta, pengelolaan pariwisata harus merujuk pada prinsip-prinsip berikut:[[44]](#footnote-45)

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata mestilah berdasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang mencirikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Pelestarian, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata alternatif yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan berbasis keunikan kepada wisatawan dan pengembangan lingkungan lokal.
5. Memberikan *apresiasi* dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika memiliki dampak positif dan memberikan manfaat, tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka mensinergikan pengelolaan pariwisata yang memiliki prinsip- prinsip pengelolaan pada penjelasan sebelumnya, dibutuhkan suatu cara pengelolaan yang bebar-benar menjamin keterlibatan semua aspek dan komponen pariwisata.

Metode pengelolaan pariwisata menurut WTO dalam Pitana dan Diarta memuat beberapa kegiatan berikut:[[45]](#footnote-46)

1. Mengkonsultasikan dengan semua *stakeholder*.
2. Mengidentifikasi isu yang akan muncul dalam kegiatan pariwisata.
3. Menyusun kebijakan yang efektif
4. Membentuk dan mendanai agen dengan tugas khusus
5. Menyediakan fasilitas dan operasional
6. menyediakan kebijakan fiskal, aturan, dan lingkungan sosial yang kondusif
7. Menyelesaikan konflik kepentingan dalam masyarakat
8. Konsep Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pada sektor pariwisata yang dimaksud adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, menyediakan lapangan kerja serta dapat memberikan manfaat terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak. Pengembangan sektor pariwisata ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengelolaan pemerintah terutama dari segi operasional pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.

Pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok sesuai dengan tujuan orang yang melakukannya, bersifat sementara, sebagai aktifitas mancari keseimbangan atau keserasian dan kebahagian dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Wisatawan mengadakan perjalanan untuk mengekpresikan atau memuaskan hasrat ingin tahu, beristirahat dan mengembaliklan kesegaran pikiran atau untuk mengurangi ketegangan pikiran, termasuk pada jasmaninya pada alam lingkungan yang berbeda.[[46]](#footnote-47)

Sedangkan menurut Burkart dan Medlik, pariwisata juga mempunyai ciri-ciri melakukan perjalanan dan menetap sementara di berbagai *destinasi* yang bersifat berbeda dari tempat yang ditinggal dengan kegiatan yang berbeda pula, mendapat pengalaman dengan maksud kembali ketempat semula dan bersifat sementara dan tidak dimaksudkan untuk menetap. Seorang pengunjung yang melakukan perjalanan atas keinginan sendiri dan bersifat sementara, dengan harapan mendapatkan kepuasan atau kenikmatan tersendiri yang belum dirasakan sebelumnya dan perubahan yang dialami selama perjalanan.

Ada beberapa komponen pariwisata menurut Burkart dan Medlik, setidaknya ada tiga yaitu *pertama,* atraksi wisata sebagai daya tarik wisata, *kedua,* amenitas merupakan fasilitas-fasilitas yang ada didaerah tujuan wisata, dan *ketiga,* aksesbilitas yang merupakan fungsi jarak dari pusat penduduk untuk pasar wisatawan dan juga transportasi dan telekomunikasi yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk menuju destinasi wisata tersebut.

Pada dunia kepariwisataan apapun bentuk yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat sebagai objek atau atraksi wisata. Objek wisata tidak terlepas dari namanya keindahan alam, kebudayaan, perkembangan ekonomi, politik dan lain sebagainnya, pariwisata merupakan *an agent of cultural changes* yang dapat *menghipnotis* perjalanan orang-orang, cara berfikir dan bertindak masyarakat yang dikunjungi serta bentuk upacara keagamaan.

Pariwisata sangat berpotensi menjadi devisa besar bagi negara , disamping sebagai sektor usaha perminyakan dan perdagangan senjata. Pariwisata menstimulasi tumbuhnya sektor lain misalnya usaha-usaha ekonomi tertentu yang saling merangkai dan saling menunjang. Pengembangan pariwisata akan menyediakan dan bahkan memperluas kesempatan kerja. Pengembangan pariwisata juga akan memunculkan perubahan-perubahan sosial dikalangan masyarakat lokal baik itu negatif maupun positif, untuk mencegah kepada perubahan yang negatif maka perlu dilakukan perencanaan yang mencakup aspek sosial, dengan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengembangan.

Menurut JJ. Spilane bahwa pengembangan pariwisata ditinjau dari sudut pelaksanaannya yang lebih bersifat teknis operasional, maka prinsipnya ialah:[[47]](#footnote-48)

1. Meningkatkan mutu dan pelayanan dengan pembinaan produk wisata yang merupakan usaha terus menerus.
2. Menimalisir resiko kerugian sekecil-kecilnya pada pembeli dan memaksimalkan keuntungan.

Dalam pengembangan pariwisata, adanya biro perjalanan dengan pelayanan yang membawa kemudahan untuk wisatawan yang bisa dirangkum, atau paket wisata. Perlu adanya faktor yang mendukung bagi seorang pramuwisata demi kelancaran perjalanan pariwisata. misalnya informasi tentang sesuatu yang ingin dilihat dan disaksikan oleh wisatawan, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh wisatawan, keterampilan dan penampilan dalam bergaul dengan semua orang yang terkait dengan proses perjalanan, mengetahui secara mendalam seluk beluk operasional biro perjalanan termasuk destinasi wisata yang lengkap dengan historis dan cultural..

Menurut Soekadijo tujuan pengembangan pariwisata diantaranya adalah untuk mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi yaitu antara lain:[[48]](#footnote-49)

“a) Meningkatkan urbanisasi karena pertumbuhan, perkembangan serta perbaikan fasilitas pariwisata. b) Mengubah industri-industri baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata c) Memperluas pasar barang-barang lokal, d) Memberi dampak positif pada tenaga kerja. Karena pariwisata dapat memperluas lapangan kerja baru (tugas baru di hotel atau tempat penginapan, usaha perjalanan, industri kerajinan tangan dan cedera mata, serta tempat-tempat penjualan lainnya)”

Pengembangan pariwisata berupaya untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas, adanya keseimbangan dan bertahap. Menurut Suwantoro, langkah pokok dalam pengembangan pariwisata berupa optimasi, konsolidasi dan pengembangan dan penyebaran dalam jangka panjang adalah:[[49]](#footnote-50)

1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan
2. Memperbesar saham wisata dari sebelumnya
3. Mempertajam dan memantapkan citra kepariwisataan
4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan
5. Memanfaatkan produk yang ada

Kebijaksanaan dalam Pengembangan pariwisata dengan indikator yang telah ditetapkan adalah:

1. Promosi, berupaya melaksanakan promosi yang selaras dan terpadu
2. Aksesbilitas, menjadikan pengembangan lintas sektoral sebuah sasaran.
3. Kawasan pariwisata (dalam pengembangan pariwisata sangat terkait dengan peran serta pemerintah dengan memperbesar dampak positif, dan mempermudah pengendalian dampak lingkungan)
4. Produk wisata, berupaya menampilkan produk wisata yang beragam atau berfariasi
5. Sumber daya manusia, untuk meningkatkan pelayanan pariwisata maka masyarakat mesti memiliki keahlian dan keterampilan.

Selain itu masukan positif pengunjung atau wisatawan juga faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata. keberhasilan pariwisata bisa diukur dengan kepuasaan pengunjung dan pelajaran yang bisa dipetik dalam hubungan dengan bidang evaluasi pengunjung dalam kurun waktu kunjungan. Dengan mengukur reaksi pengunjung tentang kepuasaan pelayanan. Evaluasi keadaan lingkungan seperti keaslian, kesesuaian orang dengan lingkungan dan kesadaran ketidak sadaran pikiran sangat besar gunanya dalam memahami pilihan-pilihan dan perilaku pengunjung.

Kemudian citra yang baik dari suatu produk wisata akan mendorong perkembangan usaha pariwisata. pariwisata akan berhasil apabila adanya kerjasama dengan saling mendukung dan membutuhkan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi menurut pelayanan dan produk wisata yang lebih baik dan bermutu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata terakumulasi dari memantapkan citra pariwisata melalui peningkatan promosi dan aksesbilitas, dan serta peningkatan mutu dan pelayanan melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia.

1. Pariwisata berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) merupakan pariwisata yang berlandaskan pada upaya pemberdayaan, baik dalam sisi ekonomi, sosial, maupun kultural merupakan suatu bentuk pariwisata yang mampu memicu tumbuhnya kualitas sosial budaya dan ekonomi masyarakat serta menjamin kelestarian lingkungan. Menurut Damanik dan Weber[[50]](#footnote-51) pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan sumber daya (atraksi, aksesbilitas, amenitas) pariwisata yang bertujuan untuk memberikan keuntungan optimal bagi pengelola dan kepuasan bagi wisatawan dalam jangka panjang.

Menurut Sunaryo, hal yang pokok dalam pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan di indonesia adalah “pembangunan kepariwisataan yang di dukung secara ekologis dan juga layak secara ekonomi”, layak secara etika, dan berkeadilan sosial terhadap masyarakat terkait*.* Wawasan pembangunan berlanjut pada prisipnya merekomendasikan untuk mengukur keberhasilan kinerja pembangunan kepariwisataan yang paling tidak melalui 4 parameter utama yakni:[[51]](#footnote-52)

1. Berlanjut secara ekologis
2. Penerimaan oleh lingkungan sosial budaya setempat
3. Secara ekonomi menguntungkan
4. Berbasis teknologi dan layak untuk diterapkanya di lingkungan tersebut

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya bertujuan untuk selalu berupaya agar dapat berkinerja dan berorintasi pada pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ilustrasi indikator kepariwisataan berlanjut dapat dilihat pada gambar

**Gambar 2. Ilustrasi Indikator Kepariwisataan berlanjut**

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam pariwisata yang berkelanjutan dibutuhkan keterlibatan semua *stakeholder* dibidang pariwisata untuk memadukan kerangka pengelolaan pariwisata, *stakeholder* baik dari industri pariwisata, konsumen, *investor* dan *Developer,* pemerhati dan pengiat warisan dan pelestari budaya, pemerintah dan pelaku ekonomi lokal dan nasional termasuk dalam bidang pendidikan untuk pengembangan.

Pendidikan nonformal sebagai jurusan yang fokus pada bidang pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi potensi-potensi yang ada di masyarakat baik potensi masyarakat yang merupakan modal sosial maupun potensi alam sendiri untuk tujuan pembangunan. Pemberdayaan sangat terkait dengan pendidikan termasuk pendidikan non formal sebagai usaha memberdayakan manusia, memampukan manusia, mengembangkan bakat yang ada pada diri manusia agar dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki dapat dikembangkan melalui pendidikan.

Pembangunan pada dasarnya adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik atau untuk menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat Pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal dalam bentuk pendidikan yang melibatkan seluruh *stakeholder* khususnya masyarakat dapat berupa pelatihan-pelatihan tertentu dengan strategi tertentu untuk mengembangkan pariwisata yang didasarkan pada kearifan lokal.

1. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community based tourism)*

Pariwisata berbasis masyarakat hadir ditengah kerancuan dari tujuan pariwisata. Salah satu dari tujuan pengembangan pariwisata adalah mengentaskan kemiskinan penduduk, yang telah menjadi masalah klasik yang belum benar-benar terselesaikan. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga diri, serta terpeliharanya nilai budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata juga dilihat dari pemangku kepentingan

**Gambar 3. Ilustrasi Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata**

Partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan kepariwisataan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya. Dalam pembangunan kepariwisataan dikenal strategi perencanaan pengembangan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan kepariwisataan.[[52]](#footnote-53)

Menurut Janianton Damanik, dkk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menekankan bahwa masyarakat bukan lagi menjadi objek atau sasaran pembangunan akan tetapi sebagai penentu atau perancang pembangunan itu sendiri. Penyusunan perencanaan dalam skala lokal merupakan syarat awal dalam upaya membangun pariwisata berbasis masyarakat ini, yang mampu menyediakan semua kebutuhan dalam kerangka tujuan jangka pendek, menengah dan panjang dan perencanaan disusun bersama dengan komunitas yang ada. Penunjang lainnya dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini adalah:[[53]](#footnote-54)

1. Tumbuhnya wirausahawan lokal yang mampu bersaing dengan Program-program pelatihan yang praktis.
2. Terciptanya tradisi yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinergik dalam bentuk ikatan usaha
3. Mampu memunculkan keunikan pariwisata yang tidak dimiliki oleh pesaing dan merupakan kekuatan lokal.

Berbagai masalah pembangunan akan mampu diatasi dengan pariwisata berbasis masyarakat dengan aktivitas ekonomi yang dikembangkan dengan tepat, perdamaian dan keselarasan masyarakat dan manajemen sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan. Dukungan dan dorongan dari pihak pemerintah juga sangat dibutuhkan sebagai mekanisme utama untuk pemberdayaan masyarakat serta membuat kerangka kebijakan yang menetukan tantangan penting dan peluang bagi pariwisata berbasis masyarakat.

peran pemerintah yang bisa dilakukan sebagai upaya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah mengembangkan pendekatan institusional pemerintah, regulasi otonomi daerah, memperkuat pengawasan pelestarian lingkungan dan perencanaan pengunaan lahan. menyusun program pelatihan keterampilan sebagai dorongan pengetasan kemiskinan dalam pariwisata berbasis masyarakat. Mengalokasikan bantuan tambahan untuk pengembangan bisnis mikro dan kecil, mengintensifkan keterlibatan bisnis perjalanan di dalam proyek pariwisata berbasis masyarakat dan menekankan pelatihan sumber daya manusia sebagai bagian yang relevan dari sektor wisata.

Menurut Sunaryo bahwa untuk mewujudkan pengembangan pariwisata yang maju dan dikelola dengan baik maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Selain pihak pemerintah dan industri swasta, masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam pembangunan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan merupakan konsep pemberdayaan masyarakat, maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada hakikatnya harus diserahkan pada beberapa hal sebagai berikut:[[54]](#footnote-55)

1. Adanya peningkatan kemampuan atau keterampilan, peran dan insiatif masyarakat pembangunan kepariwisataan
2. Adanya peningkatan posisi dan kualitas keterlibatan partisipasi masyarakat
3. Adanya peningkatan nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat
4. Adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata.

Berdasarkna pendapat di atas dapat dipahami bahwa salah satu pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal adalah pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* (*CBT*) merupakan. Karena dalam CBT, komunitas merupakan aktor utama dalam proses pembangunan pariwisata. Masyarakat dalam pengembangan pariwisata memiliki partisipasi aktif baik dalam proses pengambilan keputusan maupun distribusi keuntungan yang diterima masyarakat. Tujuan utama untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat dan memiliki ruang kontrol untuk tata kelola kepariwisataan demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat setempat,

Pariwisata yang merupakan industri non migas mampu menjalankan fungsi sebagai penyelamat devisa disaat krisis sekaligus memberikan dampak ganda yang cukup besar pada pertumbuhan sektor lain. Banyak usaha-usaha kecil yang mampu dihidupkan dalam perkembangan pariwisata sektor informal yang terkait dengan kegiatan wisata antara lain asongan, warung, jasa pemandu wisata dan sebagainya. Kemiskinan sebagai masalah yang kompleksitas, mencakup dimensi-dimensi kerentanan, deprivasi baik ekonomi maupun sosial, ketidak berdayaan, marginalisasi, aliansi, ketidak amanan dan sebagainya. Dengan adanya kebijakan publik dibidang pariwisata sangat berguna untuk mengurangi kemiskinan. Menurut Damanik, dkk adapun karakteristik industri pariwisata seperti :[[55]](#footnote-56)

1. Membuka peluang bagi penduduk lokal untuk memasarkan komoditi dan pelayanan dengan datangnya konsumen ketempat tujuan.
2. Menyentuh kawasan-kawasan marginal dengan terbukanya peluang dalam mendedikasikan ekonomi lokal
3. berkembangnya usaha-usaha ekonomi padat karya yang berskala kecil dan menengah yang terjangkau oleh kalangan menengah kebawah
4. mengikis ketergantungan kepada modal yang sebagai penentu selain modal budaya dan modal alam menjadi aset yang dimiliki kalangan menengah kebawah.

Jadi sangat jelas terlihat bahwa industri pariwisata mampu pengentasan kemiskinan dimasyarakat. Potensi-potensi alam dan budaya yang ada dapat digunakan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk pengembangan masyarakat, pariwisata alam sebagai salah satu sarana pelayanan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan pariwisata berbasis masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan.

Jadi pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu sarana, yang menekankan pola keterlibatan masyarakat lokal dalam usaha-usaha kepariwisataan yang juga bisa menerima manfaat dari kepariwisataan yang ada seperti memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan komersial, kesempatan untuk mendukung aktivitas ekonomi tradisional, meningkatkan ketermpilan masyarakat dalam berusaha, memberikan kepastian dan peluang kepada masayrakat dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas kehidupan melalui akses terhadap intraksi dengan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan yang tercipta.

Pemantapan citra pariwisata melalui peningkatan pemasaran dan aksesbilitas, dan serta peningkatan mutu dan pelayanan melalui peningkatan keahlian-keahlian sumber daya manusia merupakan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan dilibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Jadi pariwisata berbasis masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata, dimana pemberdayaan masyarakat adalah salah satu ranah pendidikan luar sekolah.

1. Kesejahteraan Sosial (Budaya, Ekonomi, Spritual dan Lingkungan)
2. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut James Midgley Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dalam suatu masyarakat. Midgley melihat Kesejahteraan sosial sebagai: suatu kondisi atau keadaan kehidupan manusia yang terbentuk ketika segala permasalahan sosial dapat dikendalikan dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.[[56]](#footnote-57)

 Sedangkan di Indonesia defenisi Kesejahteraan Sosial tidak dapat dipisahkan dari apa yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1:

 “ Kesejahteraan Sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Rumusan di atas menggambarkan Kesejahteraan Sosial sebagai suatu keadaan dimana secara ideal suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial, material dan spritual.

1. Perhatian Islam Terhadap Kesejahteraan Sosial

Sementara Islam sangat memperhatikan kesejahteraan sosial penganutnya, dan Allah Swt sebagai Tuhan menganjurkan umat Islam secara langsung di dalam Al-Quran untuk memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini memperkuat posisi Islam sebagai *the way of life* dan al-Quran sebagai kitab suci sekaligus pedoman manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia serta di hari akhir kelak.[[57]](#footnote-58)

Perhatian Islam terhadap kesejahteran sosial tergambar dalam surat An-Nisa ayat 9 yang menyeru umat manusia agar takut akan kelemahan (ketidak sejahteraan) generasi penerus mereka nantinya. Artinya hendaklah manusia memperhatikan kesejahteraan generasi penerusnya, hendaklah mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan sosial, dan nantinya mewariskannya kepada umat generasi berikutnya.

Terjemahan ayat tersebut adalah *“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang* *yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang* *mereka khawatir terhadap (Kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendakalah mereka* *bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbica dengan tutur kata yang benar”.*

Di sisi lain dari arti ayat ini dapat kita pahami, bahwa Allah Swt secara tidak langsung menyeru kepada hamba-Nya untuk tidak apatis dan egois dalam mencapai kesejahteraan, jangan hanya mementingkan diri sendiri, namun harus memperhatikan kesejahteraan orang lain, terutama generasi penerusnya. Hal ini sesuai dengan konseppersaudaran dalam Islam, bahwa umat Islam dengan umat Islam lainnya seperti bangun, saling menguatkan satu sama lain. Tentunya tidak terlepas dari konsep saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling memperbaiki atau mengingatkan kesalahan satu sama lain.

Umer Chapra menyatakan bahwa Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya kepada kebahagiaan haikiki[[58]](#footnote-59). Kebahagian hakiki adalah kebahagiaan lahir dan batin, jasmani dan rohani, luar dan dalam, fisik dan ruh manusia. Jika kebahagian jasmani dapat dipenuhi dengan hal-hal materil, kebutuhan rohani dapat dipenuhi dengan ketaatan dan kedekatan kepada Allah Swt.

1. Konsep Kesejahteraan Sosial

Biasanya dalam pengembangan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari komponen-komponen ekosistem. Komponen-komponen ekosistem tersebut setidaknya mencakup empat aspek: 1). Aspek ekologi, yakni pengembangan masyarakat terkait dengan dimensi-dimensi yang terdapat dalam ekositem sendiri. Terutama dalam pemanfaatan sumber-sumber daya tersebut sendiri dari sumber daya hayati dan sumber daya non hayati. Kedua bentuk sumber daya hayati tersebut berfungsi sebagai sumber energi bagi kehidupan komunitas. 2). Aspek ekonomi, yakni pengembangan masyarakat erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan tingkat pendapatan yang diperolehnya dalam ukuran waktu dan barang. 3). Aspek sosial budaya, yakni pengembangan masyarakat terkait pula dengan kapasitas sumber daya manusia atau institusi yang dilakukan dengan cara belajar bersama untuk membangun kelompok, membuat jaringan komunikasi antar kelompok, dan menggalang kekuatan bersama untuk melakukan advokasi sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan kelompok dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk kelangsungan hidup mereka. 4). Aspek politik, yakni pengembangan masyarakat terkait erat dengan kesadaran manusia untuk bisa mengembangkan kehidupan yang layak dan harmonis dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dengan cara-cara yang benar[[59]](#footnote-60)

Kesejahteraan di sini, bukanlah sekedar terpenuhinya “kebutuhan pokok” yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman. Menurut Goulet mengemukakan sedikitnya tiga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu:[[60]](#footnote-61)

1. Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup: pangan, sandang, perumahan/pemukiman, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, rekreasi, dll
2. Memiliki harkat dan martabat, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak tergantung kepada atau ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan fisik maupun ideologi, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka.
3. Memperoleh suasana kebebasan dalam menempuh hidup yang lebih baik, dalam artian adanya kesempatan dan kemampuan untuk meningkatkan mutu hidup tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak-pihak lain.
4. Indikator-Indikator Kesejahteraan Sosial dalam Islam

Dalam surat Quraisy ayat 3-4 Allah Swt berfirman :

....

*.........Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*

Pada surat Quraisy ayat 3-4 di atas terdapat tiga indikator kesejahteraan dalam Islam, yaitu:

a. Tauhid

b. Pemenuhan Konsumsi

c. Hadirnya Rasa Aman dan Nyaman

Jika para Ilmuan sosial mengartikan kesejahteraan sosial adalah pemenuhan kebutuhan dan kenyamanan, Islam hadir dengan konsep yang berbeda dengan adanya tambahan indikator spiritual, yaitu tauhid. Artinya manusia harus percaya dan meyakini akan Tuhan mereka, Allah Swt dan juga menyembahnya sesuai dengan apa yang telah disyariatkan Allah Swt dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Saw.

Dewasa ini, muncul beragam penelitian tentang aspek-aspek kebahagian manusia, dimana ditemukan bahwa yang membuat manusia bahagia tidak cukup hanya harta, kekuasaan, jabatan, kemewahan dan lain sebagainya. Namun sangat sulit untuk menemukan kebahagiaan manusia tanpa adanya aspek-aspek spiritulitas, dalam surat Quraisy disebut dengan menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah) yaitu Allah Swt. Oleh karena ini para era ini sering kita temukan gagasan *reclaim the religion* atau mengklaim kembali agama, atau kembali kepada agama.

Jauh sebelum penelitian-peneliatian Ilmiah tersebut ada, Allah Swt dan Rasulullah Saw telah menganjurkan kita bahwa untuk sejahtera tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan konsumsi dan adanya rasa aman saja, melainkan harus didasari dan ditopang oleh Tauhid, yaitu aspek spiritualitas kita terhadap Allah Swt. Sesuai dengan Surat Quraisy ayat 3-4 yang artinya: “*Maka hendaklah mereka menyembah* *Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah), yang telah memberikan makan kepada mereka* *untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”*

Di sisi lain, ayat ini juga memberikan pemahaman bagi kita bahwa untuk sejahtera kita harus mampu memenuhi kebutuhan pokok kita, dalam ayat tersebut disebutkan*“memberikan makan”* atau pemenuhan kebutuhan konsumsi. Dalam ilmu ekonomi setidaknya kita dapat memenuhi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Hal ini mengindikasikan bahwa umat Islam harus merdeka secara ekonomi, kemerdekaan akan ekonomi akan mempermudah manusia untuk mencapai kesejahteraan sosialnya.

Selain itu, hadirnya rasa aman juga menjadi indikator kesejahteraan sosial berdasarkan ayat ini, hal ini membuktikan bahwa dalam memabangun kesejahteraan sosial, harus ada peran dari pemerintah yang berkewajiban dalam menyelenggarakan Negara, dalam hal ini adalah memberikan rasa aman bagi masyarakatnya. Tidak ada kesejahteraan sosial dibawah bayang-bayang ketakutan, tidak ada kesejahteraan di negeri yang dipenuni dengan perang, oleh karena itu dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, harus ada peran pemerintah[[61]](#footnote-62) dan masyarakat sipil dalam rangkan menghadirkan rasa aman, nyaman dan tenteram.

Rasulullah Saw telah memberikan contoh nyata sebagai pemimpin dalam menghadirkan rasa amat bagi rakyatnya, hal tersebut tercermin dalam Piagam Madinah. Walau kala itu masyarakat Madinah sangat majemuk dan beragam secara suku, ras dan agama namun Rasulullah Saw melalui Piagam Madinah dapat menghadirkan kenyaman dan kepastian hukum bagi rakyatnya. Tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga kepada kaum Quraisy dan penduduk Madinah lainnya. Salah satu klausul dari piagam tersebut adalah, tidak ada satu kaum atau orangpun yang boleh memerangi satu kaum dengan yang lainnya di dalam kota Madinah, dan jika ada orang yang menyerang Madinah maka seluruh penduduk Madinah akan ikut memeranginya, memperjuangkan rasa amanbagi mereka. Inilah yang dimaksud dengan masyarakat yang memiliki peradaban yang baik[[62]](#footnote-63).

1. Bentuk-bentuk Kesejahteraan Sosial

Dengan begitu luasnya bidang kesejahteraan sosial maka dibagi kepada dua bentuk arti kesejahteraan sosial dalam arti sempit dan arti luas.[[63]](#footnote-64) Di indonesia dalam arti sempit sering di identikkan dengan bidang-bidang yang ditangani oleh kementerian sosial. Atau diberbagai negara yang sudah berkembang dikaitkan dengan *Ministry of Health and Welfare* (Kementerian Kesejahteraan dan kesehatan)

Sedangkan untuk bidang kesejahteraan sosial dalam arti luas sering kali diidentikkan dengan bidang yang terkait dengan kesejateraan rakyat yang meliputi berbagai Kementerian seperti: Kementerian dalam negeri, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Kementerian sosial, Kementrian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Industri kreatif, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Perumahan Rakyat.

1. Bidang-bidang Kesejahteraan Sosial dalam Arti sempit

Bidang kesejahteraan Sosial di beberapa negara yang sudah berkembang, seperti Amerika, Inggris dan Australia lebih bermakna dalam arti kesejahteraan dalam arti sempit. Karena kesejahteraan (*Welfare*) diberbagai negara yang sudah berkembang lebih bersifat khusus dan merupakan bagain yang sering disandingkan dengan bidang kesehatan dalam kementerian kesejahteraan dan kesehatan (*Ministry of Health and Welfare*)

Bila dilihat dari pembagian bidang-bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit, yang sering kali juga diidentikkan dengan pekerjaan sosial lihat pembagian yang dikemukakan Spicker dan Dinitto. Secara konvensional ada beberapa bidang yang masuk dalam bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit, digambarkan oleh fink, Friendlander, Mendoza, Zastrow, dan Kirts Ashman antara lain meliputi :

1. Bidang yang terkait dengan sistem penyampaian Layanan (*Service Delivery System*)

Sistem penyampaian layanan menurut Frindlander memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan pengembangan jaringan sistem penyampaian layanan yang baik maka salah satu unsur penting dalam proses pemberian bantuan terhadap klien dapat terpenuhi yaitu dalam kaitan dengan :

1. Layanan yang dapat diterima dari para petugas ataupun lembaganya (dalam hal ini lembaga non pemerintah) dan
2. Layanan yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah, baik ditingkat pusat, provinsi maupun lokal

Bentuk layanan yang ditawarkan dari sistem penyampaian layanan kemanusian (*human service delivery system*) dapat beragam, seperti bantuan terhadap: yatim-piatu, rumah sakit, lanjut usia, penyandang cacat, lembaga yang memberi bantuan terhadap keluarga dari terpidana penjara, rumah penampungan untuk anak yang melarikan diri dari rumah mereka, rumah penempungan untuk para gelandangan dan lain sebagainnya.

1. Bidang yang terkait dengan layanan Sosial terhadap Keluarga

Layanan terhadap keluarga tetap merupakan bidang garapan yang menarik. Salah satunya adalah karena sebagai unit dasar terkecil dari suatu masyarakat, keluargalah yang pada awalnya membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang. Di beberapa negara yang sudah berkembang ada nberbagai bentuk layanan yang lebih mengkhususkan diri pada keluarga sebagai *homemaker services,* ataupun layanan untuk para migran dan imigran.

1. Bidang yang terkait dengan pelayanan terhadap Anak-anak dan Generasi Muda.

Fink melihat layanan trehadap anak mempunyai tanggung jawab, antara lain untuk mendukung kehidupan keluarga, pencegahan dan perlindungan terhadap anak agar mereka tidak terlantarkan ataupun dianiaya. Layanan semacam ini dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang bertujuan untuk menyediakan cara agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Mengenai perkembangan anak, dinamika keluarga, peran orang tua, dan pengaruh faktor sosial budaya terhadap perkembangan anak. Layanan terhadap anak-anak dan generasi muda itu sendiri mempunyai bentuk yang beragam. Beberapa bentuk layanan yang diberikan pada negara yang sudah berkembang antara lain:

1. Layanan kesehatan ibu dan anak
2. Layanan untuk anak penyandang disabilitas
3. Layanan kesejahteraan anak
4. Layanan untuk yatim piatu dan anak terlantar
5. Layanan perlindungan pekerja anak dan
6. Layanan tempat penitipan anak (*day care dan child care*)
7. Bidang yang terkait dengan Kesejahteraan Sosial untuk lanjut Usia (Lansia) dan lain sebagainnya
8. Bidang-bidang Kesejahteraan Sosial dalam Arti Luas

Taksonomi pada bidang-bidang kesejahteraan Sosial dalam arti luas ini lebih jauh diuraikan daripada kesejahteraan Sosial arti sempit, pengelompokkan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

1. Bidang kesejahteraan Sosial dilihat berdasarkan besaran (*size*) kelompok Sasaran.
2. Bidang kesejahteraan Sosial Dilihat Berdasarkan Tingkat Usia Kelompok Sasaran
3. Bidang kesejahteraan Sosial dilihat berdasarkan kekhususan Masalah yang ditangani
4. Bidang Kesejahteraan Sosial Dilihat berdasarkan sektor-sektor Pembangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kesejahteraan sosial yang dimaksud pada implikasi Partisipasi Masyarakat pada pengelolaan Pariwisata adalah kesejahteraan sosial dalam arti luas yang berkaitan dengan kebutuhan manusia seperti Material, Spritual, Sosial Budaya, dan Lingkungan yang secara seimbang diberikan kepada setiap manusia, tanpa ada yang diperioritaskan.

1. Pemberdayaan Masyarakat Islam
2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dengan hanya memberikan bantuan berupa uang, bukanlah segalanya. Banyak proyek-proyek pembangunan atau kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat justru mematikan kreatifitas masyarakat, bahkan menjadikan masyarakat mengantungkan diri kepada pemberi bantuan. Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan uang atau bantuan proyek kepada masyarakat tidak akan meransang peran serta masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembangunan.

Dalam kasus tertentu, di dalam konsep pembangunan masyarakat, bantuan material memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting masyarakat untuk membangun diri sendiri. Ciri khas dari suatu kegiatan partisipatif adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari hal tersebut, pemberdayaan dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kemampuan. Jadi pemberdayaan adalah proses memberi daya atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang membutuhkan daya atau belum berdaya.[[64]](#footnote-65)

Menurut totok Mardikanto[[65]](#footnote-66) yang berkaitan dengan Pemberdayaan sebagai proses adalah keseluruhan aktifitas untuk memperkokoh dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keterampilan) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Memperoleh kesempatan atau mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk memperbaiki mutu hidup Sebagai proses pemberdayaan merujuk kepada kemampuan untuk berpartisipasi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana dilakukan secara sistematis dan bertahap guna menaikkan skala (*upgrade*) dari objek yang diberdayakan.

Sejati pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berupaya mengatur kehidupan mereka menjadi mandiri dan bertekad untuk membentuk masa depan sesuai dengan yang mereka impikan.[[66]](#footnote-67) Persamaan Pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan masyarakat maksudnya adalah suatu upaya yang di implementasikan dalam bentuk aktifitas dalam berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar memaksimal potensi yang dimilikinya, baik dalam bentuk potensi alam maupun tenaga, serta memancing kreatifitas masyarakat setempat untuk lebih banyak melakukan kegiatan dan intervensi guna mencapai tingkat hidup yang lebih baik[[67]](#footnote-68).

Selanjutnya pengembangan dalam pengertian yang lain adalah suatu upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.[[68]](#footnote-69)

Berkenaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat di atas, Winarni[[69]](#footnote-70) mengatakan bahwa inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowerment*), dan terciptanya kemandirian (*self reliance*). Berdasarkan penjelasan tersebut, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. Hakikatnya pemberdayaan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses penginstalan fungsi sosial dalam diri masyarakat agar masyarakat ataupun anggota kelompoknya dapat kembali berfungsi. Menurut Robinson, pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial: sebuah pembebasan kemampuan pribadi, kompestisi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife[[70]](#footnote-71) mengemukakan bahwa pemberdayaan magacu pada kata “*empowerment*” yang berarti memberi daya, memberi “power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Payne menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan’ untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumullasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lannya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan ekternal.[[71]](#footnote-72)

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan sebuah standar kehidupan yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang dimaksud tidak dilihat pada batas-batas minimum berupa kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal. Akan tetapi kebutuhan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghormatan dan eksistensinya, dan memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Beberapa ciri masyarakat yang berdaya antara lain mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan dan mengantisipasikan kondisi perubahan ke depan, mampu mengarahkan dirinya sendiri, memiliki kekuatan untuk berunding, miliki bergaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan bertanggungjawab atas tindakannya

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah memperlakukan manusia sebagai makhluk yang dapat berkembang, adaptif dan semakin lama semakin meningkat kualitasnya. Asumsi ini didasarkan pada pemaknaan bahwa: pertama, masyarakat merupakan subjek yang dapat berfikir dan bertingkahlaku secara rasional, kedua, pengetahuan sikap dan prilaku masyarakat adalah hasil dari suatu proses belajar terus menerus atau berkesinambungan. Ketiga, proses belajar dan perilaku tersebut terjadi dalam interksi sosial, Keempat, masyarakat dapat mengambil keputusan dan memberikan arah atas perilakunya sendiri dan kelima, masyarakat mampu menciptakan dan mempengaruhi lingkunganya. Berangkat dari asumsi ini, maka prinsip pemberdayaan ialah:

1. Pemutusan mata rantai ketergantungan. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah ajang pemberian dari pihak yang memiliki modal kepada yang tidak memiliki. Kerangka pemahaman pemberdayaan merupakan proses memberi akan mewujudkan semacam ketergantungan untuk menanti dan mental peminta. Pemberdayaan harus dimaknai sebagai upaya memungsikan fungsi sosial manusia secara individu dan kelompok dalam masyarakat. Sehingga ia dapat memahami potensi apa yang miliki untuk dijadikan sebagai basis usaha terus-menerus tanpa harus bergantung dengan orang lain sehingga ia dapat menjadi manusia seutuhnya. Sederhananya, prinsip pemberdayaan ialah memanusiakan manusia.
2. Proses pembelajaran berkesinambungan. Pemberdayaan dengan meminjam istilah Soedjatmoko merupakan *sosial learning* yang melibatkan unsur kolektif berupa keluarga dan lingkungan secara terus-menerus sehingga muncul kemandirian dalam diri masyarakat. Prinsip ini melibatkan mekanisme pendampingan mental dalam upaya mewujudkan insan kamil sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Pengaktualisasikan potensi yang dimiliki masyarakat. Masyarakat sebenarnya telah memiliki seperangkat nilai dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraannya. Karena itu, pemberdayaan menstimuli masyarakat agar dapat aktif berpartisipasi membebaskan ketertinggalan mereka. Mereka dapat mengetahui dan merumuskan apa yang sangat dibutuhkan dan apa pula yang menjadi biang persoalan penghambat kemajuan mereka. Dalam hal ini, masyarakat dengan bebas memiliki peluang untuk memberikan pendapat dan menentukan keputusan demi kesejahteraan mereka. Memiliki hak untuk menolak dan juga menciptakan lingkungan dimana mereka berada serta mampu bekerja sama secara kolektif untuk membina dan memperbaiki apa yang mesti diperbaiki.

Proses Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diungkap oleh United Nations adalah sebagai berikut:[[72]](#footnote-73)

1. *Getting to know the local community*

Adanya hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat dengan mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karateristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya..

1. *Gatherring knowledge about the local community*

Mengumpulkan pengetahuan masyarakat setempat, berdasarkan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokkan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

1. *Indentifying the local leaders*

Memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh/tokoh masyarakat setempat. Karena hal tersebut sangat menentukan dalam usaha pemberdayaan. Untuk itu, faktor “*the local leaders”* harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

1. *Stimulating the community to realize that it has problems*

Perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan..

1. *Helping people to discus their problem*

Meransang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

1. *Helping people to identify their most pressing problems*

Membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah terutama masalah yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutaman pemecahannya.

1. *Fostering self confidence*

Membangkitkan rasa percaya diri masyarakat yang merupakan modal utama dalam berswadaya.

1. *Deciding on a program action*

Memberdayakan masyarakat dalam menetapkan program yang berskala perioritas. Dimana program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala perioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunnya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaanya.

1. *Recognition of strnght and resources*

Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap kekuatan-kekuatan yang dimiliki dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

1. *Helping people to continue to work on solving their problems*

Membantu masyarakat untuk selalu beraktifitas secara terus menerus dan mampu memcahkan masalahnya secara kontinyu.

1. *Increasing peoples ability for self helf*

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Berdasarkan point di atas maka pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Faktor yang paling utama dalam meningkatkan potensi masyarakat yaitu dengan menggenjot SDM nya. Memberdayakan masyarakat bertujuan”mendidik masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri” tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masayrakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan.

1. Pemberdayaan Masyarakat Islam

Sementara Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif Islam menurut M. Quraish Shihab[[73]](#footnote-74) konsep pembangunan bersifat menyeluruh, menyentuh dan menghujam ke dalam diri manusia, dengan demikian ajaran tersebut dapat membangun manusia seutuhnya, baik dari segi materil maupun spritual secara bersamaan. Pemberdayaan bersifat universal dalam membangun kehidupan manusia menciptakan situasi berkembang, berdaya dan mandiri yang mengarah kepada pembangunan. Pembangunan yang dilakukan tidak dari satu sisi kehidupan. Sehingga antara upaya pemberdayaan yang satu bersinergi dengan upaya yang lain.

Antara dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebenarnya memiliki keterkaitan yang cukup signifikan bahkan secara terperinci dapat juga dikatakan bahwa dakwah sebenarnya adalah proses pemberdayaan masyarakat.

 Dakwah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan bermakna perubahan sebagai prinsip dasar equilibrium dalam kehidupan sosial masyarakat yang secara alamiah terdiri dari pengklasifikasian kelas atas dan kelas bawah. Kelas bawah sebagai masyarakat yang mengalami kehidupan terasing menjadi sasaran utama dakwah untuk memberdayakannya untuk menajadi manusia seutuhnya dengan tidak menafikan masyarakat yang berada pada kelas atas. Karena itulah, dakwah sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat sebab itu berhubungan dengan proses dimana seseorang bisa terbebaskan untuk berfikir dan bertindak atas dasar kematangan berfikir dan sangup melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain dalam istilah Kant disebut sebagai pencerahan, dan juga proses mengangkat derajat serta menyelamatkan masyarakat yang kehilangan jati dirinya yang sesungguhnya.

 Penerjemahan makna dakwah sebagai sebuah pemberdayaan tidak terlepas dari tiga dimensi dakwah yaitu makro, mezo dan mikro. Tingkatan makro berupa hidayah yang muatannya masih orisinil berupa Al Quran dan Sunnah. Tingkatan mezo merupakan integral tingkatan makro sebagai hasil penelahaan secara seksama dari apa yang terkandung dalam al Quran dan sunnah berupa metodologi yaitu konsep, teori dan kebijakan-kebijakan. Sedangkan tingkatan mikro berupa tindakan, aktivitas, program kegiatan, dan lain sebagainya yang berupa kerja nyata.

Secara leksikal istilah pembedayaan dapat diartikan sebagai penguatan dan secara istilah pemberdayaan disamakan dengan istilah pengembangan.[[74]](#footnote-75) Nanih Machendrawaty mengatakan memberikan pengertian tentang pemberdayaan:

“Istilah pemberdayaan adalah terjemahan istilah asing *empowerment.* Secara leksikal pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan pengembangan, bahkan pengertian dua istilah ini dalam konteks tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan.[[75]](#footnote-76)

Nanih memberikan pernyataan bahwa kadang istilah “pemberdayaan” dan “pengembangan” bisa disamakan pemakaiannya dalam suatu konteks atau kondisi. Bisa juga saling dipertukarkan dalam konteks waktu yang lain. Kesimpulannya pemberdayaan dan pengembangan bisa saja punya makna sama.

Lebih lanjut Nanih Machendrawaty menyatakan secara terminologis tentang pengembangan masyarakat Islam yaitu “pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*Usrah*), kelompok sosial (*jamaah*), dan masyarakat (*Ummah*).[[76]](#footnote-77)

Jelas apa yang dituturkan Nanih Machendrawaty bahwa pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam adalah menginternalisasikan semua nilai, konsep ajaran Islam ke dalam seluruh lini kehidupan masyarakat Islam. Pemberdayaam masyarakat Islam bisa diterjemahkan melakukan perbaikan terhadap kualitas hidup masyarakat Islam mulai dari perilaku individu maupun komunal secara keomprehensif dengan penekanan menemukan permasalahan yang menghambat perbaikan kehidupannya dan melakukan pencarian solusi dan permasalahan tersebut. Sasaran individual akan berorientasi pada sumber daya manusianya. Individu dalam keluarga (*Usrah*) yang berada dalam sebuah masyarakat yang telah memiliki sistem. Sistem adalah faktor penting dalam proses pemberdayaan masyarakat Islam maka dilakukan pula perbaikan sistematis dalam sistem yang bisa menunjang perbaikan kualitas kehidupan individu dalam konteks komunitas (*Jamaah*). Begitu juga lembaga, wadah sosial dan lingkungan yang lebih besar lagi (*ummah*) harus dibenahi agar sejalan dengan ruh pemberdayaan.

Pemberdayaan dalam perspektif Dakwah. Dakwah merupakan proses penanaman norma yang memerlukan agen mentransformasikan nilainya dalam masyarakat. Bicara masyarakat adalah berbicara sistem yang komplek sesuai hasil peradaban. Mentransformasikan dakwah dalam sistem masyarakat yang sudah ada mengalami sebuah proses dan dinamika rumit. Proses ini tentu tidak mudah, karena masyarakat secara psikologis punya sifat *resistance* terhadap norma dan nilai baru yang melakukan penetrasi kedalam sistem masyarakat yang sudah ada dan telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan proses dakwah mungkin kehadirannya bisa menggantikan, menambah atau mengurangi norma dan nilai yang telah ada.

Pemberdayaan perspektif dakwah merupakan proses dan dinamika dakwah itu sendiri untuk mencapai keseimbangan dan kebahagian hidup dunia dan akhirat. Keunggulan pemberdayaan masyarakat Islam dalam konteks dakwah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari segi intelektual, religius, sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi, sehingga masyarakat berdaya diharapkan benar-benar memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan sebaik-baiknya. *Goalnya* adalah masyrakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia (SDM yang baik) mandiri dan bisa membuat banyak pilihan dalam kehidupan dan memilih pilihan terbaik untuk kualitas hidupnya.

1. Bentuk usaha Pemberdayaan Masyarakat Islam

Dalam rangka pengembangan masyarakat, banyak usaha yang dapat diterapkan, seperti pengembangan sosial, politik, budaya, lingkungan dan pengembangan ekonomi, terkait dengan permasalahan ekonomi, yang menjadi masalah adalah kemiskinan dan distribusi pendapatan. Penangulangan kemiskinan yang semakin meluas dan pertumbuhan ketimpangan pendapatan merupakan pusat dari semua masalah pemberdayaan. Untuk itu yang menajadi dasar strategi pengembangan ekonomi ini adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat diantaranya kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan serta, peralatan sederhana dari berbagai kebutuhan yang secara luas dipandang perlu oleh masyarakat
2. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam menggunakan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pemukiman yang di lengkapi oleh infrastruktur yang layak serta komunikasi dan lain-lain.
3. Mendapatkan jaminan hak yang sama untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif (termasuk menciptakan lapangan kerja sendiri) yang memungkinkan adanya balas jasa yang setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Mendapatkan perhatian yang besar terhadap prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa, atau perdagangan internasional untuk memperoleh keuntungan dengan kemampuan untuk menyisihkan tabungan untuk pembiayaan usaha-usaha
5. Adanya jaminan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

Jadi pemberantasn kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan demokratisasi dalam politik merupakan wujud dari pemberdayaan ekonomi Menurut M Dawan Rahardjo, pengembangan ekonomi ummat mengandung tiga misi, *pertama,* misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor impor dan kelansungan usaha, *kedua,* pelaksanaan etika dan ketentuan hukum *syari’ah* yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. *Ketiga,* membangun kekuatan-kekuatan ekonomi umat islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf.[[77]](#footnote-78)

Pemberdayaan dalam konteks kajian ekonomi adalah sebuah pembelajaran agar masyarakat dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupan, khususnya menyangkut tentang kesejahteraan.pemberdayaan ekonomi merupakan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan secara material.

Jatuhnya ekonomi nasional yang begitu dalam dan cepat pulih dikatakan oleh sebagian pakar ekonomi disebabkan oleh sumbangan besar dari ekonomi rakyat.[[78]](#footnote-79)Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk memulihkan ekonomi nasional mengingat besarnya pengaruh ekonomi rakyat terhadap ekonomi nasional.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan manusia, pengembangan masyarakat memiliki Konsepsi pemberdayaan ekonomi yaitu:[[79]](#footnote-80)

*Pertama,* Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merencanakan dan menyiapkan sesuatu perubahan sosial yang berarti bagi peningkatan kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat sebagai peletakkan sebuah tatanan sosial di mana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usaha sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimiliki. Sehingga kebutuhan (material dan spritual) dapat dipenuhi..

*Kedua,* pemberdayaan masyarakat bukan diartikan sebagai pemberian dari pihak yang berada kepada pihak yang membutuhkan. *Mindset* seperti ini akan menjerumuskan kepada usaha-usaha yang sekedar menjerumuskan kepada usaha-usaha yang sekedar memberikan bantuan dana segar (*Fres money*) kepada masyarakat yang hanya akan mengakibatkan hilangnya kemandirian dalam masyarakat tersebut atau timbulnya mental meminta padahal dalam islam meminta itu tingkatannya beberapa derajat lebih rendah dari yang memberi.

*Ketiga,* Masyarakat tidak aka mampu melakukan perbaikan pada dirinya sendiri secara mandiri ketika pemahaman mereka tidak benar dalam melihat arti sebuah pemberdayaan adalah suatu proses pembelajaran.

*Keempat,* pemberdayaan masyarakat akan terlaksana ketika setiap individu terlibat penuh dalam setiap kegiatan, partisipasi bukan sekedar sebagai kehadiran mereka untuk mengikuti suatu kegiatan, melainkan dipahami sebagai kontribusi dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pemberdayaan masyarakat, terutama dalam tahapan perumusan kebutuhan yang mesti dipenuhi. Seyogyaknya masyarakatlah yang paling tahu kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi.

*Kelima,* masyarakat harus diberi kepercayaan bahwa tanpa ada keterlibatan mereka secara penuh, perbaikan kualitas kehidupan mereka tidak akan membawa hasil yang berarti, karena pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya pengembangan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup. Oleh karena itu, mesti ada suatu mekanisme dan sistem untuk memberdayakan masyarakat,.

1. Pemberdayaan Ruhani dan Spritual

Ife mengungkapkan ”perkembangan dan pengembangan personal sangat penting untuk memberikan rasa lebih bermakna bagi masyarakat. Kebutuhan ini lebih baik dipahami sebagai kebutuhan untuk pengembangan spritual”.[[80]](#footnote-81) Pengembangan spritual dipandang oleh Ife adalah hal penting dalam menunjang makna kehidupan manusia. Spritual mengisi kekosongan batin manusia dan memberikan arti dalam jati diri manusia. Lebih lanjut Ife tegaskan “Dimensi spritual sangat penting untuk pengembangan masyarakat. Rasa akan kesakralan dan penghormatan terhadap nilai-nilai spritual merupakan bagian penting dari pembentukan kembali masyarakat manusia dan memberikan makna dan tujuan kehidupan manusia”.[[81]](#footnote-82) kesimpulannya bahwa spritual hal yang urgen dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia baik sebagai individu maupun kolektif. Inilah yang akan mewarnai kegiatan-kegiatan manusia terkait dengan *value* sebuah kegiatan.

Manusia merupakan makhluk Allah swt sempurna di atas makhluk lain. Bangunan manusia secara garis besar terdiri dari ruhani (jiwa) dan fisik (jasmani). Moral dalam pandangan Islam merupakan tolak ukur seseorang dimata Tuhan dan menjadi pengendali bagi manusia menjalankan tugasnya dimuka bumi sebagai “*khalifah”.* Moral adalah hal utama menjadi perhatian saat Islam pertama dibawa oleh Nabi Muhammad saw, bukankah Nabi Muhammad saw diutus Allah swt adalah menyempurnakan akhlak manusia dizaman Arab jahiliah karena terjadi degradasi moral besar-besaran yang mengakar dalam jiwa mereka.

Yusuf Qardhawi dalam Didin Hafidhuddin mengatakan “akhlak ini mampu memberika makna baru terhadap konsep nilai, dan mampu mengisi kekosongan pikiran yang nyaris muncul akibat era Industrialisasi.[[82]](#footnote-83) Saat ini, umat selalu diancam degradasi moral. Budaya barat merupakan antitesa ajaran Islam, tidak dapat dibendung masuknya lewat teknologi informasi, pemuda-pemudi Islam penerus generasi Islam sudah terkontasminasi dengan budaya negatif barat.

Pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah adalah solusi tepat membentengi umat. Pendidikan dan pola dakwah Islam harus memberikan porsi besar khusus masalah ruhani Islamiyah. Kepincangan intelektual dan ruhani bisa terjadi apabila intelektual dimiliki oleh manusia yang bobrok akhlaknya. Maka kehancuran akan menjadi kenyataan. Islam dan ajarannya berusaha membawa manusia manjadi sejahtera lahir dan bathin. Pemberdayaan manusia perlu bimbingan agama dan moralitas. Manusia *Insan kamil* kalau tidak diperhatikan moralitas dan agamanya sama saja amenjauhkan manusia dari jati dirinya yang hakiki.

1. Pemberdayaan Sosial

Sosial berasal dari kata *socius* yang artinya kawan. Dapat dipahami bahwa pemberdayaan sosial adalah bagaimana memberdayakan manusia dalam konteks hidup berdampingan (berkawan) dengan manusia lain dan interaksinya. Lingkungan sosial yang kondusif bisa memjembatani manusia mengembangkan kegiatan-kegiatan positif. Masyarakat selalu memiliki norma, nilai acuan hukumyang terbentuk dengan kesepakatan bersama. Norma, nilai dan acuan hukum dalam masyarakat itu sebagian ada dilanggar, ditinggalkan atau memang tidak sesuai dengan keprimanusian, maka pemberdayaan sosial perlu dilakukan agar masyarakat berdaya secara sosial.

Pemberdayaan kadang mengutamakan modal fisik padahal keterkaitannya dengan yang lain sangat erat seperti sumber daya alam (SDA) sumber daya manusia (SDM) dan sosial. Sosial merupakan wadah masyarakat dan penting dilakukan gerakan untuk meningkatkan kualitas sosial seperti yang diungkapkan Zubaedi

Ketaatan pada sistem dan norma (*norms*), keyakinan (*beliefs*),nilai (*value*) sikap (*Attitudes*) budaya bernegara (civic culture) saling percaya (*social trust*), solidaritas dalam hal kerjasaam (*solidarity cooperation*) perilaku dalam berkerja (*coorperation behavior*) peran dan aturan main (*rules and rules*), Organisasi sosial (*social organitation*)jaringan kerja (*networks*) hubungan interpersonal (*interpersonal relationship*) tata cara dan keteladanan (*procedures and precendent*), keterkaitan horizontal dan vertikal (*horizontal and vertikal lingkages*)[[83]](#footnote-84)

Zubaedi mengungkap secara rinci empat belas poin untuk meningkatkan kualitas hubungan manusia dalam interaksi masayarakat. Semuanya menjurus kepada perbaikan kehidupan sosial manusia dalam komunitasnya. Apabila tercapai kualitas interaksi sosial dalam sebuah masyarakat baik akan memudahkan proses pemberdayaan. Pemberdayaan butuh masyarakat secara komprehensif keterlibannya dan semua tahapan proses mulai dari identifikasi, pencarian solusi, pemecahan masalah dalam masyarakat. Jalinan interaksi yang baik akan membuat pemberdayaan semakin efektif dan mudah dicapaui.

Ada beberapa strategi yang bisa ditempuh melakukan pemberdayaan sosial dalam artian memberdayakan masyarakat komunitas dan interaksinya seperti diungkapkan Nanih Machendrawaty dalam bukunya

1. *Direck contact*

Kontak langsung dengan masyarakat merupakan hal paling efektif mengajak masyarakat memahami masalah sosial dan problemnya, sehingga masyarakat teransang minatnya seputar masalah-masalah sosial mereka. Mereka akan berfikir bahwa merekalah yang paling baik mengetahui, memahami dan menyelesaikan masalah dalamkondisi sosialnya

1. Demontrasi hasil

Masyarakat dalam sistem sosial akan melakukan hal-hal yang sudah dilakukan turun temurun oleh nenek moyangnya. Sehingga pola pikirnya terkungkung dengan yang sudah tercontoh dan memang sudah merasakan efeknya. Mengajak masyarakat untuk memperbaiki kondisi sosialnya kepada yang lebih baik, pemberdayaan sosial perlu memberikan contoh pemahaman baru dan pola pikir yang baru dan mencontohkan praktek dan hasilnya. Biasanya masyarakat akan melakukan kalau sudah melihat hasil atau dampaknya.

1. Bekerja dengan pemimpin masyarakat

Kekuatan legitimasi dari pemimpin masayrakat perlu untuk dipertimbangkan sebelum terjun memberdayakan masayrakat. Masyarakat mempunyai pemimpin formal dan non-formal. Pemimpin mereka lebih mengetahui selera dan seluk beluk masyarakatnya, dan akan banyak memberikan data-data di lapngan yang tentu berguna dalam melakukan pemberdayaan sosial

1. Paksaan Sosial

Paksaan sosial (*social presure*) adalah bagaimana mengkondisikan masyarakat sehingga masyarakat terpaksa melakukan suatu hal, misalnya:

1). Memaksa masyarakat melalui perturan yang dibuat bersama pemimpin masyarakat. Jika ada yang melanggar dia akan mendapat sangsi materi maupun sosial. Misalnya gotong royong kalau tidak ikut akan mendapatkan sangsi

2). Perlombaan bisa juga dijadikan strategi untuk membuat masyarakat teransang yang sebenarnya adalah sifatnyamemaksa, misalnya membuat lomba lingkungan sehat.

3). Penggunaan teknik propagand, ini efektif karena bermain secara halus, seolah ide dari pemberdayaan itu datang dari masyarakat, padahal ide itu sudah menjadi sugesti bagi masyarakat dan akhirnya nilai-nilai dan norma diinternalisasikan dalam sistem sosialnya akan mereka anggap seakan itu bukan datang dari luar tapi adalah produk mereka sendiri.[[84]](#footnote-85)

1. Pemberdayaan Budaya

Globalisasi budaya telah mengikuti pola yang sama seperti globalisasi ekonomi. Budaya universal berkembang karena disebarkan luaskan melalui media global yang dikendalikan secara luas dan dijalankan sesuai kepentingan transnasional. Televisi, musik, arsitektur, makanan, minuman, pakaian, film, sport dan bentuk-bentuk lain dari hiburan menjadi semakin serupa dimanapun di dunia ini.

Untuk menghadapi globalisasi budaya, sangat sulit bagi masyarakat untuk melestarikan budaya lokal mereka sendiri yang menjadikan keunikan wilayahnya, namun globalisasi budaya ini merupakan komponen penting dalam pengembangan masyarakat[[85]](#footnote-86). Prinsip keanekaragaman menghendaki bahwa keanekaragaman budaya dipertahankan, itulah budaya yang memberikan identitas dan rasa memiliki kepada orang-orang sehingga pengembangan budaya sangat penting bagi masyarakat.

Dalam konteks pengembangan masyarakat, pengembangan budaya memiliki empat komponen, yaitu

1. Melestarikan dan menghargai budaya lokal
2. Melestarikan dan menghargai budaya asli/pribumi
3. Multikulturalisme
4. Budaya Partisipatori.[[86]](#footnote-87)

Agar pembangunan budaya efektif dalam konteks pengembangan masyarakat yang lebih luas, warisan budaya harus tidak dipisahkan tetapi harus dilihat sebagai bagian yang nyata dari kehidupan masyarakat. Jika hal ini terlaksana dapat menjadi poin sentral untuk interaksi sosial, keterlibatan masyarakat dan partisipasi yang luas, dan dapat menjadi proses penting dalam aspek pengembangan masyarakat yang lain, seperti pengembangan sosial, ekonomi dan lingkungan.

1. Pemberdayaan Ekonomi

Ekonomi adalah faktor penting dalam kelangsungan hidup sebuah komunitas atau masyarakat, apalagi zaman serba canggih dengan perkembangan yang pesat telah membuat persaingan semakin ketat. Sekarang dunia menghadapi kenyataan perdagangan bebas. Persaingan jika tidak diimbangi dengan perbaikan ekonomi secara struktural dalam tubuh umat Islam maka akan terjadi masalah ekonomi yang kompleks yang bisa menimbulkan kemiskinan. Kemiskinan adalah akar dari kesusahan dan kesenjangan dalam masyarakat. Islam selalu mengingatkan umatnya untuk memperhatikan ekonomi, karena ekonomi yang sehat akan membuat masyarakat Islam kuat dan bermartabat.

Faktor pemahaman juga memperparah motivasi umat islam untuk menguasai ekonomi. Tidak dipungkiri masih banyak mengartikan kehidupan Rasulullah saw yang sederhana identik dengan kemiskinan. Hasil pemahaman ini adalah tidak perlu kaya, tidak perlu berlomba-lomba dalam kekayaan. Sederhana bukanlah padanan untuk kata miskin, karena banyak ayat dan hadis memberikan motivasi kepada umat islam agar senantiasa berusaha dalam ekonomi, bahkan Rasulullah mengatakan bahwa kemiskinan itu mendekatkan diri kepada kekufuran.

 Perlu dipahami dalam rukun Islam poin 4 dan 5 mengatakan agar menunaikan zakat dan menunaikan haji. Sekilas pintas rukun keempat dan kelima terkesan ibadah semata. Logika yang terkandung dalam point tersebut adalah umat Islam harus kaya, karena bagaimana mungkin umat islam menunaikan zakat dan haji kalau tidak dengan ekonomi. Kaya musti dikejar oleh umat islam dalam tanda kutip karena banyak ibadah yang bisa dilakukan dengan kekayaan. Haji terutama bagi umat Islam di Indonesia, apakah mungkin umat Islam Indonesia bisa pergi ke tanah suci Mekkah menunaikan ibadah haji kalau tidak disokong oleh ekonomi yang kuat, tentu jawabannya tidak.

Mario Teguh seorang motivator pernah mengungkapkan dalam sebuah kalimat *“jangan sampai orang miskin beriman minta-minta kepada orang kaya yang tidak beriman”*makna filosofinya sangat dalam bahwa islam harus unggul dalam ruhani (iman) dan ekonomi. Jangan sampai mengejar akhirat semata melupakan dunia, karena dunia yang baik akan mempermudah umat Islam melakukan ibadah untuk mendapatkan kebahagian akhirat.

Persoalan ekonomi umat terutama di Indonesia saat ini, bahwa negara Indonesia adalah negara berkembang artinya Indonesia bukan negara kaya, karena negara kaya akan dilambangkan dengan istilah negara maju. Kendala ini bukan untuk ditangisi, melainkan harus dicarikan jalan-jalan keluar khususnya umat islam di Indonesia agar mampu dan berdaya di bidang ekonomi baik dalam skal makro atau mikro.

Sistem ekonomi sekarang seperti yang diungkapkan Ahmad Muhammad al- “Assal dalam Thahir Malolo bahwa “kapitalis mementingkan individu dan kelompok dari sosilias mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan individu.[[87]](#footnote-88) Perkembangan dewasa ini dunia secara garis besar menganut dua pahamekonomi yaitu kapitaslis dan sosialis. Kapitalis memberikan kekuasaan yang besar kepada pemilik modal artinya alat-alat produksi bisa diserahkan kepada pihak swasta sedangkan sosialis kebalikannya , pemerintah memegang kendali dalam sistem perekonomian dan bahkan swasta bisa dibatasi atau dihapuskan sama sekali.

Ekonomi syariah adalah solusi ekonomi berbasis nilai-nilai ajaran Islam, ciri-ciri ekonomi islam dikemukakan Nanih Machendrawaty sebagai berikau:

1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam
2. Ekonomi islam merealisir keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat
3. Kegiatan ekonomi Islam bercita-cita luhur
4. Kegiatan ekonomi Islam bersifat pengabdian
5. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam islam adalah pengawasan yang sebenarnya yang mendapatkan kedudukan utama

Lebih lanjut Nanih Machendrawaty menyebutkan garis besar dari prinsip-prinsip mengenai kesejahteraan ekonomi Islam, secara singkat dapat dikemukakan seperti dibawah ini:

1. Allah yang memiliki alam.
2. Ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran saling *taawun*. Allah telah menciptakan perbedaan-perbedaan dalam tujuan, keberanian, dan usaha-usaha manusia juga dalam kondisi-kondisilainnya. Perbedaan-perbedaan ini merupakan dasar kehidupan ekonomi sehingga seorang manusia bergantung pada yang lainnya untuk dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan ekonominya
3. Aktifitas ekonomi Islam didasarkan kepada prinsip persaudaraan, persamaan, dan perwalian ekonomi yang universal.[[88]](#footnote-89)

Ali Azis menyatakan bahwa ekonomi Islam bersendikan beberapa nilai dasar:

1. Kepemilikan dalam ekonomi Islam dalam pengertian dipahami adalah asas kemanfaatan. Dalam islam tidak ada kepemilikan mutlak karena semua adalah milik Allah swt, hanya saja manusia berhak menggunakan dan mengambil manfaat darinya. Kepemilikan itu adalah secara bersama tidak individualis seperti ideologis kapitasli. Maka dalam Islam ada ilmu *faraidh* tentang pembagian harta warisan, bisa disimpulkan bahwa harta hanya bisa dimiliki sampai seseorang meninggal dunia, dan harus dimanfaatkan oleh orang lain atau ahli warisnya. Terutama sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai individu seperti Rasulullah saw katakan “*semua orang Islam berserikat dalam tiga hal yaitu air, api dan garam*” (HR. Ahmad dan Abu Daud)
2. Prinsip keseimbangan, diartikan harus ada keseimbangan yang musti dijaga antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum yang dalam prinsip fiqh disebut *maslahah mursalah*
3. Mengandung keadilan (*justice*). Keadilan adalah dasar dalam Islam yang musti diterapkan dalam masyarakat baik sosial, politik, juga ekonomi.[[89]](#footnote-90)
4. Pemberdayaan Lingkungan

Manusia dan lingkungan dalam kehidupan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dua hal yang sangat erat kaitannya. Kehidupan manusia di bumi berada dilingkungan yang tidak ada batasnya. “Lingkungan ini berbeda satu sama lainnya dalam beberapa hal yaitu letak, geografis, dataran, iklim, proses geglogi dan tanahnya, sumber daya alam. Serta flora dan faunanya. Unsur-unsur ini semua bisa mempengaruhi lingkungan manusia sebagaimana manusia itu sendiri pada saat yang sama mampu mempengaruhi unsur-unsur tersebut.[[90]](#footnote-91)

Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan manusia, baik dalam bentuk upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya maupun sikap atau perilaku lainnya. Disisi lain manusia juga dapat mempengaruhi keadaan lingkungan yang sudah ada disekitarnya. Manusia merubah situasi ataupun kondisi lingkungan sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Dengan demikian jelas bahwa lingkungan mempengaruhi kondisi lingkungan dimana mereka berada sesuai dengan keinginan dan kebutuhan manusia itu.

Agar kondisi yang dapat saling mempengaruhi ini tidak mengarah kepada terjadinya kerusakan yang selanjutnya juga akan menyengsarakan kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan ini, dan islam telah memberikan jalan untuk menuju kearah itu.

Nurcholis Madjid berpendapat bahwa implikasi dari kekhalifaan manusia ialah keperluannya pada kemampuan untuk memahami alam sekitarnya dimana ia bearada dan menunaikan amanah. Kemampuan manusia dalam memahami alam ditopang oleh potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.

Kemampuan manusia dalam memahami alam juga dimungkinkan oleh kadar ciptaan Allah terhadap alam dengan ukuran yang sudah ditentukan dan tidak berubah-ubah dalam waktu yang tidak terbatas dan bersifat *predictable.* Maka alam yang diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan posisinya lebih rendah dari manusia sebagai khalifah dan bukan sebaliknya, manusia tunduk pada fenomena alam.

Menurut Marwan Al Kadiri dalam bukunya menyebutkan bahwa salah satu doktrin yang ditanamkan dalam ajaran islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw kepada nmanusia adalah Islam sebagai *Rahmatan lil alamin* bagi seluruh alam. Makna dari rahmat tersebut yaitu mencakup: kesejahteraan, kehidupan yang damai, kecerdasan, kebersihan dan kesehatan[[91]](#footnote-92)

Keberadaan alam merupakan bukti dari kekuasaan Allah swt, maka manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang merupakan wakil Allah untuk mengelola alam dan pada saat yang sama, menjaga dan melindungi kelestarian alam.[[92]](#footnote-93) Jadi ini berarti ada upaya bagi manusia untuk memikirkannya dan mengambil semua pelajaran dari alam untuk pemanfaatan dan pengembangan alam bagi kepentingan hidup manusia

1. Pemerintah sebagai pelaku Pemberdayaan

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan disebuah wilayah bertanggungjawab untuk memajukan daerah yang dipimpinya. Salah satu caranya melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak luar seperti LSM dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperbaiki mutu kehidupannya.

Upaya peningkatan keberdayaan masyarakat dilakukan agar masyarakat bersedia menerima dan mampu mengadopsi berbagai program pembangunan/pemberdayaan. Melalui pemberdayaan diharapkan masyarakat mampu berfikir secara lebih rasional, lebih produktif, guna memperbaiki tingkat kesejahteraannya.[[93]](#footnote-94)

Pemerintah sebagai pelaku pemberdayaan bisa berperan sebagai fasilitator. Secara garis besar peran fasilitator pemberdayaan masyarakat memiliki tiga peran, yaitu: *pertama:* sebagai pembangkit kesadaran terhadap pentingnya perubahan. *Kedua:* sebagai motivator penggerak perubahan. *Ketiga:* sebagai mediator dengan berbagai pemangku kepentingan.[[94]](#footnote-95)

Peran fasilitator secara konvensional dibatasi hanya untuk menyampaikan inovasi atau mempengaruhi penerima manfaatnya pemberdayaan menggunakan berbagai teknik dan pendekatan sehingga menerima dan mengadopsi apa yang disampaikan. Tetapi pada saat ini peran sebagai fasilitator juga bertanggung jawab untuk menjembatani hubungan antara pemangku kekuasaan dengan berbagai komponen yang terkait dalam proses pemberdayaan.[[95]](#footnote-96) Selain itu fasilitator juga berperan sebagai pemberi penyadaran/motivator, pendorong pembangunan, mengatur/organizing, memfasilitasi atau mempelancar kelompok dan sebagainnya.[[96]](#footnote-97)

**Gambar 5. Peran fasilitator**

Sehubungan dengan fungsi fasilitator di atas maka seorang fasilitator ditengah masyarakat harus mampu menempatkan dirinya dengan cara sebagai berikut:

1. Mampu melakukan pembauran diri dengan masyarakat
2. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan
3. Menetapkan hubungan dengan kelompok sasaran.[[97]](#footnote-98)

Menurut welhendri dalam buku sosiologi dakwah tugas utama yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan masyarakat adalah mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Masyarakat perlu dibantu untuk mengadakan penilaian yang terbaik tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka dan bagaimana cara mereka memperoleh kepuasaan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mampu menidentifikasi kebutuhan yang dirasakan dan memiliki rasa sadar akan pentingnya rasa kepuasaan.[[98]](#footnote-99)

Diantara masyarakat dan pemerintah atau penanggung jawab program tentu mempunyai rasa kepuasaan yang berbeda. Ini menuntut agar semua yang terakit harus bersinergi. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Pelaksanaan program pembangunan memerlukan tenaga fasilitator yang handal dan memahami nilai sosial dan budaya yang ndianut masyarakat setempat. Peran fasilitator sangat besar karena ia merupakan penggerak perubahan agar masyarakat mampu memiliki penghidupan yang lebih baik.

1. Damsar, & Indrayani. *Pengantar Sosiologi Perdesaan,* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 220 [↑](#footnote-ref-2)
2. Aprillia Theresia, *Pengembangan Masyarakat Community Development, Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyaraqkat,* (Surakarta: UNS Press, 2014), h. 216 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid,* h.216 [↑](#footnote-ref-4)
4. Hasim dan Remiswai, *Community Development Berbasis Ekosistem,* (Jakarta: Diadit Media,2009), h. 23. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid, h. 24 [↑](#footnote-ref-6)
6. Mochtar Daniel, Darmawati, Nieldalina, *PRA Participatory Rural Appraisal Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.60 [↑](#footnote-ref-7)
7. Damsar, & Indrayani. *Pengantar Sosiologi Perdesaan,* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 221 [↑](#footnote-ref-8)
8. Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.53 [↑](#footnote-ref-9)
9. Aprilia Theresia, et al, *Pembangunan Berbasis Masyarakat,* (Bandung: Alfabeta, 2014) [↑](#footnote-ref-10)
10. Dwiningrum, S.I.A *, Desentralisasi dan Partisispasi Masyarakat Dalam Pendidikan,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 56 [↑](#footnote-ref-11)
11. Alfitri, *Community Development: Teori dan Aplikasi,* (Yogyakarat: Pustaka Pelajar,2011), h.39 [↑](#footnote-ref-12)
12. Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global,* (Bandung: Alfabeta,2012),h. 92 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid,* h.93 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid,* h. 95 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid,* h. 96 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid,* h. 97 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid,* h. 98 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid* [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid* [↑](#footnote-ref-20)
20. Aprilia Theresia, et al, *Pembangunan Berbasis Masyarakat,* (Bandung: Alfabeta, 2014) [↑](#footnote-ref-21)
21. Abu Huraerah, *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat,* (Bandung: Humaniora, 2011), h. 116 [↑](#footnote-ref-22)
22. Cohen, JM, dan N.T. Uphoff, ***Rural Development Participation***, (Cornell University RDCCIS: New York, 1977). [↑](#footnote-ref-23)
23. Oos M. Anwas, *Op.cit* h. 97 [↑](#footnote-ref-24)
24. Taliziduhu Ndhara, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan masyarakat Tinggal Landas,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), [↑](#footnote-ref-25)
25. Yoyon Suryono & Herman Yudan, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program-program pusat Kegiatan belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran.* (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat,2016), h. 6 [↑](#footnote-ref-26)
26. Priaksukmana Soetarso & R Mohammad Mulyadin, *Pembangunan Desa Wisata L, Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah* (*info sosial Ekonomi Vol 2 No 1: 2001)*,h. 39-40 [↑](#footnote-ref-27)
27. Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di indonesia,* (Yogyakarta: Gava Media, 2013),h. 142 [↑](#footnote-ref-28)
28. Aprilia Theresia, et al, *Pembangunan Berbasis Masyarakat,* (Bandung: Alfabeta, 2014),h. 208 [↑](#footnote-ref-29)
29. Jim Ife & Tesoriero Frank, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.309-314 [↑](#footnote-ref-30)
30. Ndhara Taliziduhu, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan masyarakat Tinggal Landas,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h. 105 [↑](#footnote-ref-31)
31. Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.214 [↑](#footnote-ref-32)
32. Dea Devianti, *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan BalikPapan Tengah,* (ejurnal administrasi Negara. Vol (2) : 380-394*,*2013), h. 384 [↑](#footnote-ref-33)
33. Islamy m Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara,* (.Jakarta:Bina Aksara 2003), h.114-115 [↑](#footnote-ref-34)
34. <http://digilib.unila.ac.id/12785/15/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 15 Agustus 2019 [↑](#footnote-ref-35)
35. Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.( Yogyakarta: Media Pressindo, 2002),h. 171-174 [↑](#footnote-ref-36)
36. Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*.(Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 43 [↑](#footnote-ref-37)
37. I Gusti Bagus Rai Utama, MA, *Pemasaran Pariwisata,* (Denpasar: CV Andi Offset, 2017), h. 1 [↑](#footnote-ref-38)
38. Oka A. Yoeti, M.B.A, *Dasar-Dasar Pengertian Hospitaliti dan Pariwisata,* (Jakarata: PT Alumni Bandung,2010),h. 40 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid,* h. 47 [↑](#footnote-ref-40)
40. Oka A. Yoeti, M.BA, *lot cit* [↑](#footnote-ref-41)
41. Salmadanis, *Metode dakwah dalam Perspektif Al-Quran( Suatu Tinjauan Terhadap ayat An Nahl 125),* (Padang: Disertasi, 2002), h. 177-180. [↑](#footnote-ref-42)
42. I Gede Pitana, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), h. 80 [↑](#footnote-ref-43)
43. Muljadi.A.J, *Kepariwisataan dan Perjalanan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h. 28 [↑](#footnote-ref-44)
44. I Gede Pitana dan Surya Diarta, I Ketut,*Op.Cit*  h. 81 [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid,* h. 88 [↑](#footnote-ref-46)
46. JJ.Spillance, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya, Diterjemahkan oleh Andiyanto,* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 21 [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid,* h.135 [↑](#footnote-ref-48)
48. Soekadijo, *Dampak Perkembangan Sektor Pariwisata terhadap berbagai Aspek kehidupan,* (Bandung: Alfabeta, 1996),h. 112 [↑](#footnote-ref-49)
49. Gamal Suwantoro, *Dasar-dasar Pariwisata,*(Yogyakarta: Andi,2004), h. 5 [↑](#footnote-ref-50)
50. Janianton, Damanik et al, *Proverty Alleviation Through Tourism= Penanggulangan Kemiskinan Melalui pariwisata,* (Yogyakarta: Center For Tourism Studies Gadjah Mada University, 2005), h. 26 [↑](#footnote-ref-51)
51. Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya Di indonesia,* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 45-47 [↑](#footnote-ref-52)
52. Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya Di indonesia,* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 217-219 [↑](#footnote-ref-53)
53. Janianton, Damanik et al, *Proverty Alleviation Through Tourism, Penanggulangan Kemiskinan Melalui pariwisata,* (Yogyakarta: Center For Tourism Studies Gadjah Mada University, 2005), h. 30 [↑](#footnote-ref-54)
54. Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya Di indonesia,* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 218-219 [↑](#footnote-ref-55)
55. Janianton, Damanik et al, *Op.Cit*  h. 53 [↑](#footnote-ref-56)
56. Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 22-23 [↑](#footnote-ref-57)
57. Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah,* (Gema Insasi Press, Jakarta: 2010), hal 7 [↑](#footnote-ref-58)
58. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi,* (Gema Insani Press, Jakarta: 2011), hal 21 [↑](#footnote-ref-59)
59. Hasim dan Remiswai, *Community Development Berbasis Ekosistem,* (Jakarta: Diadit Media,2009), h. 219-220 [↑](#footnote-ref-60)
60. Totok Mardikanto, Ms, Dr.Ir. H. Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.3-4 [↑](#footnote-ref-61)
61. Haryanto, *Rasulullah way of Managing People,* (Khalifa, Jakarta: 2009), hal 70 [↑](#footnote-ref-62)
62. Din Syamsuddin,*Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani,* (Penerbit Kalimah, Ciputat: 2001), hal 6 [↑](#footnote-ref-63)
63. Isbandi Rukminto Adi, *Op.Cit*, h. 91-104 [↑](#footnote-ref-64)
64. Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan,* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h.77 [↑](#footnote-ref-65)
65. Totok Mardikanto, *Op.Cit*, h. 223 [↑](#footnote-ref-66)
66. Isbandi Rukminto Adi, *Op.Cit*, h. 54 [↑](#footnote-ref-67)
67. Sutrisno Kh dan Mary Johnston, *membina Masyarakat Pembangunan Kasus-kasus Pengembangan Masyarakat,* (Sukarta: Yayasan Indonesia Sejahtera, 1992), h.12 [↑](#footnote-ref-68)
68. Nanich Machendrawati, Agus Ahmad Syafe’i, *op.cit,* h.42 [↑](#footnote-ref-69)
69. Winarni, *op.cit,* h.74 [↑](#footnote-ref-70)
70. Jim Ife & Frank tesoriero, *Community Development,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2014), h.335 [↑](#footnote-ref-71)
71. Welhendri Azwar, *Sosiologi Dakwah,* (Sumatera Barat: Imam Bonjol Press. 2014),h. 151-153 [↑](#footnote-ref-72)
72. Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternative, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2007), h. 100. [↑](#footnote-ref-73)
73. M. Qureish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat,* (Bandung: Mizan,2004), cet. Ke-18, h.301 [↑](#footnote-ref-74)
74. Nanih Machendrawati, Agus Ahmad Syafe’i, *pengembangan Masyarakat Islam dari Idiologi Strategi Sampai Tradisi,* (Bandung: PT. Rossdakarya, 2001), h. 42 [↑](#footnote-ref-75)
75. *Ibid* [↑](#footnote-ref-76)
76. *Ibid* [↑](#footnote-ref-77)
77. Desi Syafriani, Pengembangna Masyarakat Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) At Taqwa Muhammadiyah di Kota padang(padang: Tesis, 2014), h. 30-31 [↑](#footnote-ref-78)
78. Ida Ayu Yaman, *Pemulihan Ekonomi Indonesia Melalui PemberdayaanEkonomi Rakyat,* (Buletin Studi Ekonomi Indonesia tahun 2007), h.4 [↑](#footnote-ref-79)
79. M Djauzi Mudzakir, *Teori dan Praktek Pengembangan Masyarakat,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 12-15 [↑](#footnote-ref-80)
80. Jim Ife & Frank Tesoriero, *Op.cit,* h. 480 [↑](#footnote-ref-81)
81. Ibid, h. 481-482 [↑](#footnote-ref-82)
82. Didin Hafidhuddin , *Dakwah Aktual,* (Jakarta: Gema Insani Press,2001) *Ibid,* h. 232 [↑](#footnote-ref-83)
83. Zubaedi ¸*Pengembangan Masyarakat* (Wacana Kritik), (Jakarta:Kencana 2013), h. 159-160 [↑](#footnote-ref-84)
84. Lihat Nanih, *Op.cit,* h.98-106 [↑](#footnote-ref-85)
85. Jim Ife, *Op.cit,* h. 448 [↑](#footnote-ref-86)
86. *Ibid,* h. 449 [↑](#footnote-ref-87)
87. Thahir Maloko, *Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Al Risalah Volume 11 Nomor 1 Mei 2011) [↑](#footnote-ref-88)
88. *Ibid,* h. 19 [↑](#footnote-ref-89)
89. Moh Ali Azis, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat,* (Surabaya: LkiS Pelangi Aksara, 2009), h. 28-30 [↑](#footnote-ref-90)
90. Ahmad Khalid Allam, dkk, *Al-Quran dalam Keseimbangan Alam dan Kehidupan* (Jakarta: Gema Insani, 2005), Alih bahasa oleh Abd Rohim Mukhti, h. 86 [↑](#footnote-ref-91)
91. Marwan Al Kadiri, *Keseimbangan antara Kebutuhan akal, jasmani dan Rohani,* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim. 2004), alih bahasa oleh Luqman Abdul jalal, h. 31-32 [↑](#footnote-ref-92)
92. Najmuddin Ramly, *membangun Lingkungan Hidup yang Harmoni dan Berperadaban,* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu,2005), h. 6 [↑](#footnote-ref-93)
93. Chabib Soleh, *Dialetika Pembangunan Dengan Pemberdayaan,* (Bandung: Fokusmedia, 2014), h. 77 [↑](#footnote-ref-94)
94. *Ibid,* h. 178 [↑](#footnote-ref-95)
95. Totok Murdikanto, *op cit,* h.140 [↑](#footnote-ref-96)
96. Azis Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Tera, 2009), h. 72-73. [↑](#footnote-ref-97)
97. Totok Murdikanto, *Lot. cit* [↑](#footnote-ref-98)
98. Wlhendri Azwar, *op cit,* h. 167 [↑](#footnote-ref-99)